

BUKU REFERENSI

KONSTRUKSI DAN APLIKASI POLITICAL ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING (PESA) DI PERUSAHAAN INDONESIA

Bambang Haryadi



Penerbit Yayasan Citra Dharma Cindekia



BUKU REFERENSI

KONSTRUKSI DAN APLIKASI POLITICAL ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING (PESA) DI PERUSAHAAN INDONESIA



Penerbit Yayasan Citra Dharma Cindekia



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Lingkupan Hak Cipta:

Pasal 2

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemenang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU REFERENSI
**KONSTRUKSI DAN APLIKASI POLITICAL
ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING
(PESA) DI PERUSAHAAN INDONESIA**

BAMBANG HARYADI



**BUKU REFERENSI : KONSTRUKSI DAN APLIKASI
POLITICAL ECONOMY OF SHARIAH ACCOUNTING
(PESA) DI PERUSAHAAN INDONESIA**

ISBN : 978-623-6078-78-5

Penulis:

Bambang Haryadi

Editor:

Taufik Ardianto

Penyunting:

Windar Adi Susilo

Desain Sampul dan Tata Letak:

Agus Susilo Nugroho

Penerbit:

Yayasan Citra Dharma Cindekia

Redaksi:

Grobogan, Jawa Tengah, 58114

Telp. 0895605883330

email: citra.dharmacindekia@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT tas terselesaikannya penyusunan buku referensi tentang ekonomi politik akuntansi syariah (PESA) ini. Sungguh hanya semata karena rahmat dan barakahNya lah pekerjaan ini dapat kami rampungkan. Buku ini merupakan penyempurnaan dari penyusunan buku sebelumnya yang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

Buku ini kami sampaikan dengan harapan tentu, agar nuansa pengetahuan akuntansi syariah dalam bidang penelitian khususnya akan lebih berkembang. Dengan menghadirkan kerangka konsep ekonomi politik akuntansi syariah (PESA) ini diharapkan akan mampu menjadi alat analisis bagi penelitian akuntansi yang berkenaan dengan pengungkapan keadilan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini masih perlu penyempurnaan dan pengembangan di kemudian hari. Oleh karena

itulah maka kami senantiasa mengharap kritik dan saran membangun demi kesempurnaan buku ini.

Terakhir kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung dan membantu terelesainya buku ini. Terkhusus karya ini kami persembahkan kepada keluarga tercinta Sita, Alma, dan Alya yang selalu setia menemani kala suka dan duka dalam proses penyusunan ini.

Harapan kami semoga buku ini dapat menjadi bagian literatur bagi para pembaca dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia.

Bangkalan, Maret 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 Latar Belakang Kajian Laba dalam Ekonomi Politik.....	1
1.1. Pemaknaan Laba	1
1.2. Kajian Laba Dalam Perspektif Materi	6
1.3. Pergeseran Makna Laba	10
BAB 2 Ekonomi Neo Klasik	24
2.1. Ekonomi Neo-Klasik.....	24
2.2. Kritik Atas Konsep Ekonomi Neo Klasik..	32
BAB 3 Ekonomi Politik.....	41
3.1. Ekonomi Politik Klasik Solusi Atas Kelemahan Neo Klasik.....	41
3.2. Ekonomi Politik Sebagai Konsep Tanpa Batas Disiplin	45
3.3. Ekonomi Politik Sebagai Alat Menginterpretasi Fenomena	49
3.4. Ciri-Ciri Ekonomi Politik.....	54
3.5. Pola Analisis Ekonomi Politik	60

3.6. Ekonomi Politik Sebagai Unit Sistem Sosial	63
BAB 4 Political Economy of Accounting (PEA)....	68
4.1. Pengertian Political Economy of Accounting (PEA)	68
4.2. Karakteristik Political Economy of Accounting (PEA)	78
BAB 5 Nilai-Nilai Tauhid dalam Islam.....	87
5.1. Pentingnya Nilai Tauhid	87
5.2. Konsep Kepemilikan	90
5.4. Konsep Keadilan	96
5.5. Konsep Pertanggungjawaban	104
5.6. Konsep Distribusi Kekayaan	107
BAB 6 Konstruksi Nilai Tauhid.....	110
6.1. Proses Internalisasi Nilai Tauhid Ke dalam Political Economy of Accounting (PEA).....	110
6.2. Menggapai Political Economy of Shariah Accounting (PESA)	115
6.3. Karakteristik Political Economy of Shariah Accounting	124
BAB 7 Aplikasi <i>Political Economy of Shariah Accounting</i> (PESA) dalam Menilai Pendapatan	131

7.1. Pendapatan Dalam Bingkai Materi.....	131
7.2. Penilaian Kenaikan Pendapatan dalam Bingkai PESA.....	133
BAB 8 Aplikasi <i>Political Economy of Shariah</i> <i>Accounting</i> (PESA): Beban Hutang dan Gaji yang Tak Pernah Diharapkan	
8.1. Perusahaan Menimbun Hutang: Kinerja Perspektif Materi	169
8.2. Kenaikan Beban Hutang dalam Bingkai PESA	172
8.3. Biaya Gaji: Analisis Kinerja Perspektif Materi dan Bingkas PESA.....	184
BAB 9 Aplikasi <i>Political Economy of Shariah</i> <i>Accounting</i> (PESA) Perusahaan Rugi Terus: Kerugian Fatamorgana (<i>SARAABUM</i>).....	
9.1. Selalu Rugi: Terbelenggu Dalam Keterpurukan	198
9.2. Makna Kerugian Dalam Perspektif PESA	200
DAFTAR PUSTAKA	228

BAB 1

Latar Belakang Kajian Laba dalam Ekonomi Politik

1.1. Pemaknaan Laba

Laba (rugi) menurut Suwardjono (2008 : 464) dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa). Sedangkan rugi sebaliknya yaitu nilai pendapatan di bawah biaya yang terjadi. Adapun Soemarso (2004: 227) menyatakan bahwa angka terakhir (*output*) dalam laporan laba rugi adalah laba atau rugi bersih (*net income*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*).

Dari beberapa pengertian laba (rugi) di atas maka laba rugi pada hakekatnya merupakan selisih positif atau selisih negatif yang diperoleh dari hasil penjualan (pendapatan) operasi dan non-operasional perusahaan terhadap biaya-biaya yang timbul dalam satu periode akuntansi dan akan menyebabkan perubahan dalam posisi *equity (net asset)* perusahaan. Dengan menggunakan istilah Skousen (2005:119), laba (rugi) hakekatnya merupakan perbedaan antara jumlah pendapatan yang diperoleh suatu satuan usaha selama periode tertentu dengan jumlah biaya yang dapat diaplikasikan kepada pendapatan.

Laba (profit) selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja perusahaan. Bahkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK: 2009:5 Par 17) dinyatakan bahwa:

Informasi kinerja perusahaan terutama profit, diperlukan untuk menilai perubahan potensial

sumberdaya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya yang ada. Disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya.

Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan resiko investasi yang akan ditanggung dan semakin besar kemungkinan return yang akan diperoleh. Ini akan mengakibatkan semakin banyak investor yang akan berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Melalui

mekanisme pasar tercapailah keseimbangan yang tinggi terhadap harga saham.

Berdasarkan pernyataan SAK tersebut ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Pertama, bahwa kinerja perusahaan lebih ditekankan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Kedua, informasi kinerja sangat penting dalam mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara potensial, memprediksi kemampuan usaha perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ketiga, informasi kinerja terutama laba dapat diperoleh dari informasi laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan.

Sebagai simbol utama kinerja perusahaan, laba (rugi) digambarkan dengan perkembangan hasil laba perusahaan di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa jika kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba menurun maka menjadi indikasi kalau kinerja perusahaan juga menurun. Sebaliknya, jika kemampuan menghasilkan laba meningkat akan menjadi indikasi jika kinerja perusahaan meningkat pula.

Pentingnya laba sebagai simbol kinerja telah menjadi fokus perhatian para peneliti dalam menilai kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki kinerja baik dengan ukuran laba tinggi maka dapat menjadi cerminan kekuatan perusahaan dalam: (1) memprediksi kemampuan perusahaan memperoleh *return* saham perusahaan (Ball and Brown, 1968; O'Connor, 1973; Ou and Penman, 1989; Dechow 1994, Brady, 2003; Parawiyati dan Baridwan, 1998; Sidharta dan Santoso, 1998; Ety dan Sudiby, 1999; Sutrisno dan Sudiby, 1999), (2) memprediksi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan arus kas dan deviden perusahaan (Bowen, 1986; Dechow, 1994; Weston dan Brigham, 1993; Aharony dan Swary, 1980), (3) menguji kemampuan perusahaan

dalam mendapatkan laba di masa depan (Weston dan Brigham, 1993; Shubita, 2010; Trisnawati, 1999; Machfoedz, 1995; Machfoedz, 1994). (4) memprediksi kebangkrutan usaha dan kesulitan keuangan (Horrigan, 1965; Beaver, 1966; Altman, 1968; Pankof dan Virghill, 1970; Weston dan Brigham, 1993).

1.2. Kajian Laba Dalam Perspektif Materi

Beberapa hasil riset di atas membuktikan bahwa laba menjadi sangat dominan dan sangat penting sebagai ukuran kinerja perusahaan. Dengan istilah lain menurut Irianto (2006:143) laba telah menjadi tujuan dan laba adalah segala-galanya. Laba dijadikan aktivitas utama bisnis dan menyajikannya sebagai *bottom line* dalam laporan laba rugi perusahaan. Laba sebagai indikator utama kinerja perusahaan, bagi pengguna laporan dapat digunakan untuk memprediksi berbagai kondisi keuangan di masa yang akan datang.

Penempatan laba sebagai indikator utama ini, lebih lanjut didukung pemahaman pendekatan akuntansi positif yang mendasari penyusunan laba. Dalam pendekatan akuntansi positif, laba merupakan cermin realitas fisik dan sebagai potret atas fakta-fakta sosial yang bebas nilai (Ghozali, 2004). Bebas nilai yang dimaksud di sini adalah bebas dari nilai ilmu pengetahuan, pengalaman, sifat, kepentingan dan nilai masyarakat (Triyuwono: 2000), nilai agama, sosial, moral, politik, kepentingan dan nilai ekonomi (Ayudhia: 2008), yang seluruhnya melekat secara *inheren* dalam diri akuntan yang menyusun angka tersebut.

Hal ini mengandung maksud bahwa angka laba (rugi) merupakan angka yang disusun berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan yang senyatanya. Angka ini tidak dipengaruhi atau terbebas dari berbagai nilai dan kepentingan para penyusun laporan keuangan. Angka laba (rugi) sangat objektif dan netral menggambarkan kondisi perusahaan apa adanya. Pemahaman ini

sekaligus mengokohkan posisi laba sebagai angka yang “sangat krusial” dan “terpercaya”. Angka ini benar-benar diyakini dan dipercaya dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi di masa yang akan datang secara lebih objektif dan netral.

Kepercayaan terhadap angka laba (rugi) ini tentu akan semakin bertambah tinggi lagi jika laporan keuangannya telah diberi opini audit oleh kantor akuntan publik (KAP). Terlebih lagi jika auditnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan tergabung dalam “*The Big Four*” dan opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Jika demikian pemahamannya, maka hal ini dapat menjadikan moral hazard bagi pihak manajemen (Ghozali, 2004). Mereka akan berlomba-lomba menyajikan kinerja dengan angka laba sebaik mungkin (*earning management*), sehingga tujuan menarik calon investor dapat tercapai. Pengaturan laba (rugi)

menurut Scott (2003:369) merupakan pilihan kebijakan manajer akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan-tujuan khusus perusahaan dan individu manajer. Hal ini mengandung maksud bahwa manajer akuntansi memiliki kesempatan, kekuasaan dan pengetahuan untuk dapat mengatur seberapa besar laba yang diinginkan sesuai dengan tujuan dibuatkannya laporan tersebut.

Kecenderungan sikap seperti ini menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba agar perusahaan yang dikelola memiliki laba (kinerja) yang positif, baik di mata para investor, kreditor, calon investor maupun masyarakat secara umum. Karena keinginan yang besar itu, maka tidak jarang perusahaan menggunakan cara-cara yang menyalahi aturan dengan memanipulasi data-data akuntansi demi mengejar hasil kinerja perusahaan yang bagus. Bahkan terkadang perencanaan telah dirancang atau dibuat sedemikian rupa pada jauh hari sebelumnya untuk mengatur laba yang akan

dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu dengan praktek seperti ini sudah tidak lagi mengabaikan keabsahan informasi bagi perusahaan karena semata-mata mengejar prestasi laba individu perusahaan.

1.3. Pergeseran Makna Laba

Praktek pengaturan laba sebagai fokus utama kinerja telah membawa akuntansi menjadi alat untuk mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini para pemilik modal. Akuntansi dalam dunia modern hanya menjadi alat pemuas dan mengikuti kemauan para pemilik modal semata. Imbas dari praktik akuntansi yang berfokus pada angka laba dan mendesain sedemikian rupa agar kinerja perusahaan bagus adalah akuntabilitas angka kinerja tidak lagi dipertimbangkan. Praktek-praktek manajemen laba, *transfer pricing*, *taking a bath* dalam meningkatkan kinerja menjadi hal yang wajar dan skandal akuntansi makin merajalela (Arvian, 2008). Dengan kata lain apa yang dikhawatirkan

Irianto (2006) bahwa kinerja yang berorientasi pada laba akan mengantarkan pada timbulnya *moral hazard*, timbulnya eksploitasi baik antar sesama manusia maupun atas lingkungan secara nyata akan terjadi.

Beberapa contoh kasus besar kejahatan keuangan yang terjadi di korporasi dengan menggunakan teknik-teknik manipulasi dan rekayasa laporan keuangan misalnya kasus Xerox tahun 1986, Enron pada tahun 2001, Worldcom tahun 2002, dan Global Crossing dan Adelthin di Amerika Serikat. Semua adalah perusahaan besar yang dalam waktu sekejap hancur dikarenakan adanya skandal akuntansi (Kompas, 2002). Kasus perusahaan Asian Agri yang telah melibatkan akuntan keuangan dimana telah melakukan manipulasi pajak (*transfer pricing*) sehingga merugikan negara. Ditutupnya salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama (*The Big Four*) yang terlibat dalam kasus Enron akhirnya ditutup.

Kasus terbaru pada bulan September tahun 2008 adalah perusahaan terbesar dan bergengsi di AS, Lehman Brother yang telah berusia 100 tahun, juga memiliki skandal laporan keuangan hingga mengalami kebangkrutan. Lehman Brother menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar AS di pembukuannya. Aset Lehman Brothers dibuat terpusat pada kredit kepemilikan rumah bermasalah. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya dan tentu ini merupakan kasus penyesatan informasi yang material dalam akuntansi. Rekayasa akuntansi ini sesungguhnya telah diketahui oleh Auditor Ernst Young sebagai auditor keuangan Lehman Brothers. Oleh karena itu auditor ini juga dinilai lalai, dan melaporkan hasil audit palsu soal keuangan lembaga keuangan (Suara Karya, 2010).

Di dalam negeri, kasus Bank Lippo pada tahun 2002 yang menerbitkan tiga versi laporan keuangan yang masing-masing berbeda

sehingga informasi yang di gunakan oleh para pemakai laporan keuangan menjadi bias dan tidak valid, serta kasus Bank Suma, Bank Bali. Semua ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan untuk memperoleh kinerja yang baik dengan tujuan tertentu sering dijadikan modus operandi dalam menjarah dana perusahaan dan pihak-pihak lain yang dirugikan. Para akuntan publik, auditor internal perusahaan dan aparat penegak hukum sering tidak mampu mendeteksi teknik-teknik *creative accounting* yang semakin canggih yang dilakukan para penjahat akuntansi.

Gambaran kasus di atas menjadi bukti adanya realitas kontradiksi pemahaman umum bahwa angka laba (akuntansi) adalah bebas nilai (*value free*) dan objektif. Padahal kenyataannya akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan sebagai ukuran kinerja sangat sarat dengan nilai (nilai ekonomi, moral, budaya, politik, kepentingan, agama, sosial, dan lingkungan). Bukti ini telah memberi peringatan bahwa secara

nyata kinerja dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya dan politik dimana akuntansi itu dilaksanakan.

Fakta-fakta ini juga membantah apa yang dikemukakan Watts dan Zimmerman (1986) serta Horngren dan Foster (1991) bahwa akuntansi yang menghasilkan kinerja merupakan pengetahuan yang bersifat prosedur rasional untuk menyediakan informasi bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Pemahaman semacam ini tentu akan menyebabkan akuntansi seakan menjadi barang teknologi nyata dan bebas dari nilai dalam arti sebagai mesin hanya bekerja dengan sendirinya.

Padahal dalam kenyataannya, akuntansi dan laba tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungan di mana akuntansi itu dioperasikan. Akuntansi dan laba senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya (Hopwood 1983, 1987, 1990; Morgan 1988; Miller dan Napter 1993). Hal ini terbukti dengan banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata akuntansi

terbentuk dari lingkungan budaya masyarakat, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial (Hofstede 1987; Perera 1989; Abdel Magid 1981; Bailey 1988; Solomon 1978; Tinker 1984; Gambling 1974; Burchell et al. 1985).

Di samping dipengaruhi oleh lingkungan, pada perkembangannya ternyata akuntansi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan bahkan membentuk lingkungan di mana ia dipraktikkan. Bahkan Triyuwono (2006:181-2) menyatakan bahwa akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dan membentuk perubahan organisasi. Tiga peranan umum akuntansi dalam proses perubahan organisasi yaitu bagaimana akuntansi menciptakan visibilitas dalam sebuah organisasi, bagaimana akuntansi berfungsi sebagai praktik kalkulasi dan bagaimana akuntansi menciptakan domain untuk aksi ekonomi.

Tinker (1978: 8) melihat bahwa akuntansi pada hakekatnya sebagai anak dari budaya di mana akuntansi itu berada. Artinya

bahwa akuntansi sebagai suatu ilmu maupun praktek dibentuk melalui interaksi sosial yang sangat kompleks (lihat Morgan, 1988, Hines 1989: Francis 1993). Jika lingkungan yang membentuk akuntansi tersebut adalah lingkungan kapitalisme, maka perkembangan akuntansi sebagai ilmu dan prakteknya akan bernafaskan kapitalisme juga.

Demikian pula Watts and Zimmerman (1986) mengakui bahwa sistem ekonomi kapitalis tempat dimana akuntansi dipraktikkan memiliki pengaruh sangat besar terhadap warna dan corak akuntansi. Bailey (1988; 129) memperkuat pernyataan ini dengan menunjukkan bahwa akuntansi yang dipraktikkan di negara-negara sosialis sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik serta bentuk-bentuk organisasi di negara setempat. Hasil ini menjadi bukti bahwa ternyata akuntansi yang dipraktikkan di Negara Sosialis tersebut sangat sarat dengan nilai-nilai. Mackevicius (2005) juga menggambarkan

tentang sistem akuntansi yang berbasis sistem ekonomi sosialis. Fakta menunjukkan bahwa sistem ekonomi sosialis yang dimiliki negara Lithuania telah membawa negara ini memiliki sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi yang dimiliki negara kapitalis lainnya.

Menurut Avian (2008) ilmu akuntansi sebagai ilmu sosial dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan budaya kapitalisme. Akuntansi telah dimanfaatkan oleh para praktisi untuk memuluskan jalannya membentuk suatu budaya bisnis yang penuh dengan budaya kapitalisme dan menghasilkan kinerja sesuai keinginannya. Sesungguhnya akuntansi tidaklah bebas nilai, sebagai bagian dari ilmu sosial perkembangan ilmu akuntansi telah terjerembab ke dalam praktek dan perkembangan ilmu yang sarat dengan unsur subjektivitas, maskulin dan menghalalkan segala cara dan penuh dengan perilaku tidak etis yang merupakan wujud nyata dari budaya kapitalisme.

Berdasarkan fakta ini perlu dipertanyakan kembali jika dikatakan bahwa angka-angka akuntansi utamanya laba (rugi) merupakan indikator utama dan terpenting dalam menilai dan menganalisis kinerja perusahaan. Angka-angka akuntansi itu objektif dalam menggambarkan realitas perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang, dan angka ini bebas dari nilai. Pada kenyataannya angka-angka kinerja itu tidak pernah bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak penyusun laporan keuangan tersebut. Sebagaimana dinyatakan Irianto (2006: 150) bahwa laba sebagai simbol utama kinerja pada hakekatnya merupakan sesuatu yang dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga input yang sama dapat dihasilkan beragam laba jika digunakan metode yang berbeda. Laba (rugi) adalah “**simbol yang diciptakan**” yang memiliki akar kepentingan tertentu. Bahwasanya pelestarian pengkeramatan laba hanya akan membesarkan satu atau lebih kelompok kepentingan tertentu

sementara memarginalkan dan bahkan menghancurkan yang lainnya.

Akuntansi selama ini hanya berbasis pada kepentingan para pemegang saham (*shareholders*). Kepedulian akuntansi terhadap mereka diutamakan dalam membantu pengambilan keputusan mengenai pendapatan, kekayaan dan peningkatan kinerja (Edwards & Bell, 1961; Chambers, 1966; Sterling, 1970; Beaver & Demski, 1974). Banyak penelitian empiris yang membuktikan tentang peran akuntansi terhadap kepentingan pemegang saham, antara lain Smith & Smith (1970); Still (1972); Haried (1972, 1973); Adelberg (1979); Epstein (1975); Lee & Tweedie (1977, 1981); Chang & Most (1979).

Karena realitas menunjukkan bahwa angka laba (rugi) itu sarat dengan nilai dan sangat subjektif, maka sudah seharusnya di dalam menilai dan memahami laba (rugi) suatu perusahaan tidak lagi hanya dilihat dari angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan,

namun yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah bagaimana proses angka-angka itu tercipta serta bagaimana dampak terciptanya angka-angka akuntansi itu bagi seluruh pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap perusahaan. Penyadaran bahwa laba (rugi) yang dihasilkan perusahaan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, berimplikasi dalam penilaian dan pemahaman laba (rugi) secara lebih arif dan tepat.

Besarnya pengaruh lingkungan sangat tergantung dari kompleksitas permasalahan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bersangkutan. Semakin kompleks tentu semakin besar pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Bagi perusahaan publik, tentu kompleksitas permasalahan semakin luas dikarenakan banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan publik ini. Nuansa kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan

lain dari berbagai pihak setiap saat muncul dan menyatu dalam perusahaan publik.

Realitas di atas menunjukkan bahwa memang tidak cukup memahami laba (rugi) hanya dari aspek keuangan saja, diperlukan analisis yang lebih luas dari sekedar aspek keuangan. Terlebih lagi untuk perusahaan publik seperti PDAM, PLN, Telkom dan lainnya, karena di sana sangat sarat kepentingan, nilai, pengaruh ekonomi dan politik baik dari pemerintah sebagai investor, maupun lainnya. Menilai dan memahami laba (rugi) suatu perusahaan, sangat tidak cukup hanya mempelajari dan mengamati angka-angka laba (rugi) yang diberikan perusahaan kemudian lantas membuat beberapa keputusan bisnis di masa yang akan datang. Tentu ini bisa membuat keputusan kita salah atau bahkan menyesatkan karena hanya didasarkan pada angka-angka yang tersirat. Padahal faktanya informasi yang tersurat justru lebih banyak dan lebih signifikan jika digunakan sebagai informasi pendukung.

Oleh karena itu diperlukan alat analisis yang lebih luas dan mampu menyediakan informasi secara lengkap dalam menilai dan memahami laba (rugi) suatu perusahaan. Alat analisis berupa akuntansi kritis terutama yang menggunakan rerangka *political economy* ditujukan untuk memahami sekaligus melakukan evaluasi atas peran akuntansi dalam konteks ekonomi, sosial dan politik atau mengkaji bagaimana peran akuntansi dalam konteks tertentu, baik organisasional maupun lingkungan yang lebih luas (Irianto, 2006: 145).

Dengan pemaknaan laba (rugi) melalui ekonomi politik, orientasi tidak lagi terfokus pada angka laba semata. Lebih dari itu akan memberikan gambaran tentang laba (rugi) sebagai sebuah refleksi kekuasaan berbagai pihak yang berkepentingan untuk turut serta dalam menentukan laba (rugi). Selain itu dengan rerangka ini, laba (rugi) dapat dinilai dari sejauh mana distribusi kekayaan yang dihasilkan perusahaan telah disalurkan secara merata dan

berkeadilan. Ekonomi politik memaknai laba (rugi) dari sudut pandang konteks ekonomi, sosial dan politik dimana laba (rugi) itu dihasilkan oleh perusahaan.

BAB 2

Ekonomi Neo Klasik

2.1. Ekonomi Neo-Klasik

Perkembangan ekonomi neo klasik dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran akan peran gereja yang terlalu intervensi dan bahkan berlebihan terhadap kegiatan individu sehingga dirasakan hilangnya kebebasan setiap individu pada masyarakat Eropa. Kondisi ini semakin menyadarkan masyarakat waktu itu untuk lebih mengurangi intervensi tersebut dikarenakan jika terus terjadi maka perkembangan ekonomi individu khususnya semakin mengalami penyusutan dan bahkan pembunuhan aktivitas individu. Kebebasan menjadi harapan dan perjuangan bagi masyarakat Eropa waktu itu. Dengan adanya kebebasan atas intervensi inilah maka setiap individu akan dapat mewujudkan keinginan dan tujuan, termasuk dalam memperoleh tingkat kesejahteraan (Clark, 1998).

Perkembangan atas kegagalan peran negara dalam mengatur ekonomi masyarakat selanjutnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi neo klasik. Sebagaimana Clark (1988) menjelaskan bahwa pada waktu itu pandangan para pengusaha dan pemilik industri menunjukkan bahwa pihak pemerintah mampu menjadi regulator yang mampu mengintrodusir sesuatu kebijakan dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama kepada pedagang dan pemilik industri. Bahkan ada anggapan sebaliknya bahwa pemerintah justru dianggap sebagai pihak yang membatasi atau bahkan menjadi penghalang bagi para pengusaha dalam meningkatkan kekayaan.

Berdasarkan realitas ini tampak bahwa hal tersebut menjadi dasar dari perkembangan mekanisme pasar sebagai instrumen ekonomi yang paling efektif dan efisien. Mekanisme pasar bagi pihak produsen akan dapat secara bebas mendapatkan bahan baku dan memproduksinya

menjadi barang tanpa ada batasan. Pada bagian lain, sisi penawaran dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen menjadi tersedia dengan kuantitas banyak. Namun demikian dengan berbagai variasi produk yang ada menimbulkan kebebasan konsumen untuk menentukan pilihan atas produk yang dibutuhkan.

Teori nilai dan distribusi merupakan asumsi dalam konsep mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar ini hukum penawaran dan permintaan menjadi penentu harga relatif. Artinya bahwa jika harga yang ada dianggap lebih tinggi daripada biaya produksi dan laba yang didapatkan, maka merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke dalam pasar guna meningkatkan sisi penawaran, sehingga bisa menurunkan harga. (Caporaso dan Levine, 1994:46). Dengan perubahan menuju mekanisme pasar maka selanjutnya akan menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dikarenakan

dengan mekanisme pasar maka kesejahteraan masyarakat dapat terjadi secara alamiah.

Berdasarkan konsep dan perkembangan yang ada, secara umum mekanisme pasar yang merupakan *trade mark* dari ekonomi neo klasik memiliki beberapa karakteristik metodologi yang menonjol dalam ilmu ekonomi yaitu positivisme dan saintisme. Metodologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan materiil, yang empirik dan kasat mata serta lebih mengutamakan variabel yang bisa diukur. Hal ini berarti bahwa variabel yang tidak terukur dan tidak bisa dianalisis tidak bisa dimasukkan kedalam bagiannya. Dengan demikian maka berakibat pada banyaknya persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Bahkan pendukung metodologi ini cenderung bersikap netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan. Karena itu, tidak mengherankan kalau persoalan pokok yang dibahas oleh para pembuat kebijakan yang berpikir atas dasar ilmu pengetahuan positivistik itu adalah persoalan

bagaimana “memperbesar kue nasional”. Terutama bagaimana meningkatkan kekayaan dan kemakmuran materil melalui penggalakan transaksi di pasar yaitu, akumulasi kapital melalui pasar dan ukuran keberhasilan juga berujud prestasi dalam mendorong pertumbuhan kapital.

Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi neo klasik itu juga mengajukan asumsi khas tentang hakekat manusia. Dimana manusia dipandang semata-mata sebagai “makhluk ekonomi” yang berperilaku seperti “*utility-maximizing machine*” (mesin yang berfungsi memaksimalkan keuntungan) dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Manusia dianggap hanya akan bergerak kalau kepadanya ditunjukkan “iming-iming” yang sifatnya materil. Inilah yang mendasari munculnya kebijakan publik yang dalam praktek membanjiri warga masyarakat dengan kepuasan materil, dengan harapan kepuasan itu akan menimbulkan ketenangan. Sedangkan hal yang dilupakan adalah perilaku manusia tidak hanya dituntun

oleh rasionalitas, tetapi juga oleh akhlak, moralitas dan pertimbangan etika.

Terakhir, pendekatan ekonomi neo-klasik itu juga mengembangkan sikap yang khas mengenai organisasi dan lembaga sosial. Lembaga sosial yang paling diutamakan adalah pasar, sedangkan organisasi dan lembaga sosial lain dianggap “*given*”, yang paling penting adalah mekanisme pasar. Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar.

Hal yang menarik kemudian adalah pandangan kaum ekonom neo klasik mengenai keluarga. Dalam ideologi ini, keluarga (rumah tangga) dipandang sebagai lembaga sosial yang berperan ganda. Pertama, sebagai rumah tangga yang berfungsi sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan kepuasan dengan

mengonsumsi barang yang diproduksi secara massal oleh perusahaan. Semakin getol rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa itu, semakin “maju” ekonomi itu, demikian argumennya. Kedua, rumah tangga juga berfungsi sebagai produsen input abstrak yang disebut “tenaga kerja”. Cara menyebut tenaga kerja dengan sebutan “sumberdaya manusia” juga memuat unsur ideologi kapitalistik itu. Istilah ini sebenarnya muncul dalam lingkungan pabrik. Di sana bisa ditemui mesin (sumberdaya fisik) dan manusia yang menanganinya (sumberdaya manusia). Status keduanya pada dasarnya disamakan, yaitu sebagai sumberdaya. Karena itu upaya memenuhi keperluan buruh seringkali berujud upaya memenuhi kebutuhan manusia sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh. Sebagai sumberdaya, manusia memerlukan ketrampilan, lapangan kerja, upah minimum yang memadai, dan sebagainya. Karena semata-mata dipandang sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh, ia

dianggap tidak memerlukan pemenuhan hak sebagai manusia utuh, misalnya hak untuk berserikat dan hak-hak lain demi pengembangan identitas dirinya (Mughtar, 2002).

Berkenaan dengan pengaruh teori ini terhadap realitas ekonomi sebagaimana hasil penelitian Hoogvelt dan Tinker (1978) yang menilai pengaruh teori ekonomi neoklasik terhadap praktek akuntansi dengan cara menilai kinerja keuangan perusahaan multinasional. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa di negara-negara miskin kinerja keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh aspek politik yang ada di negara tersebut. Selain itu penelitian lanjutan sebagaimana dilakukan terhadap perusahaan multinasional pertambangan yaitu Delco (Inggris) dan direlasikan dengan kontroversi yang terjadi di Cambridge University tentang kritik Piero Sraffa terhadap teori ekonomi neoklasik (marginalisme) pada tahun 1962, maka disimpulkan bahwa teori yang mendasari praktek akuntansi dipengaruhi

teori neoklasik (marginalisme). Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neoklasik (marginalisme) pemilik modal akan memperoleh porsi distribusi pendapatan yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori dan juga praktek akuntansi sarat dengan nilai-nilai marginalisme (Tinker, 1980).

2.2. Kritik Atas Konsep Ekonomi Neo Klasik

Dalam perkembangan ekonomi neo klasik telah banyak mendapat kritik dari para pakar. Fakta "kegagalan pasar" dalam seluruh aspeknya, sebenarnya kini telah luas diakui. Kecuali tentu bagi para ekonom kolot dan bebal, mereka tetap ngotot bahwa pasar betapapun tidak sempurnanya masih bermanfaat untuk mengalokasikan kelangkaan sumber daya secara efisien. Menurut premis dasar aliran neo-klasik ini (baik yang Keynesian maupun kaum "Moneterist", barometer pasar: seperti tingkat harga, besar upah, tingkat suku bunga,

pendapatan nasional, dan lain sebagainya, masih mencerminkan perubahan-perubahan "permintaan-penawaran." "Teori keseimbangan umum" yang menjadi dasar terbentuknya mekanisme pasar serta kekuatan tawar-menawar antar orang dalam sebuah sistem ekonomi, masih terus digunakan untuk menjelaskan, menganalisa, bahkan merencanakan perekonomian (Wiboyo, 1988).

Bagi kaum neo-klasik yang "*moneterist*", persaingan bebas merupakan doktrin yang mesti dijunjung tinggi, peran negara hanya akan membuat mekanisme pasar terdistorsi sehingga alokasi sumber daya secara efisien tidak terjadi. Sementara, walaupun mengkritik para pembela "mekanisme pasar" dengan menganjurkan campur tangan negara untuk merangsang kegiatan ekonomi karena kekuatan pasar tidak berjalan sebagaimana dibayangkan (pasar tidak sempurna), para pengikut Keynes tetap berdiri pada asumsi dasar yang hampir sama dengan para penganut mekanisme pasar, yakni

dipertahankannya preferensi subyektif dari para pelaku ekonomi. Perbedaan di antara mereka hanya terletak pada penekanan sisi permintaan atau penawaran serta lingkup atau cakupan di mana analisa ekonomi harus dilakukan. Ekonom neo-klasik lebih menekankan sisi penawarannya (*ekonomi mikro*, teori produktivitas marjinal, teori harga serta penawaran uang, dan sebagainya), sedangkan pengikut Keynes lebih menekankan sisi permintaannya (*ekonomi makro*, permintaan agregat: tingkat upah, tabungan, investasi, dan sebagainya).

Terdapat premis dasar dan pra-andaian dari ekonom neo-klasik maupun Keynesian di mana pengandaian-pengandaian yang menjadi landasan teori mereka pada kenyataannya sudah tak dapat lagi menjelaskan kenyataan konkrit yang dihadapi saat ini. Pada tingkat "dunia", sejarah masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa sehingga landasan teori ekonomi neo-klasik yang bermula di abad ke XVIII maupun "revisi" terhadapnya (Keynesian) di

tahun-tahun 1930-an, ternyata harus dipertanyakan relevansinya dengan kenyataan sosial yang ada sekarang.

Beberapa kritik atas ekonomi neo klasik secara umum sebagaimana disampaikan oleh Wiboyo (1988) berkenaan dengan hal berikut. Pertama, hubungan pertukaran, baik pada tingkat agen-agen, prinsipal, perusahaan, kelompok, antar wilayah ataupun negara. Kegiatan pertukaran ini dilakukan oleh semua pihak untuk memperoleh manfaat. Dalam keadaan tertentu, yang dipostulatkan oleh pengandaiannya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan pertukaran barang maupun jasa tersebut akan memperoleh manfaat sesuai dengan "*preferensi subyektif*" masing-masing orang. Melalui mekanisme harga, memungkinkan hubungan produksi (sebagai kasus khusus dari pertukaran tak langsung) dipadukan ke dalam hubungan pertukaran. Dengan demikian dalam paham ekonomi neo-klasik, *nilai ekonomi muncul karena interaksi antar individu yang terpisah dari hubungan*

produksi dan tidak mengakar pada nilai kerjanya. Hubungan pertukaran komoditi berlangsung menurut preferensi subyektif setiap individu, yang diungkapkan sebagai suatu urutan konsisten dari sejumlah komoditi yang dianggap *tersedia* di satu pihak, dan *langka* di pihak lainnya. Dari mana asal usul individu ini? Bagaimana setiap individu mampu melakukan pertukaran? Apakah dasar dari preferensi individu itu? Dan, oleh otoritas siapakah "bakat, citra dan karsa" diberikan? Seluruh pertanyaan ini dipandang tidak relevan oleh paham mekanisme pasar.

Kedua, Hubungan pertukaran selalu berada dalam keseimbangan umum. Jika muncul ketidakstabilan di dalam interaksi permintaan-penawaran, maka dipostulatkan ketidakstabilan itu akan tetap menuju kepada keseimbangan umum, entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam kenyataan ekonomi, terbukti bahwa ketidakseimbangan pasar (distorsi harga, inflasi ataupun stagnasi) sering

berlangsung tanpa henti. Resesi ekonomi 1870-an, depresi besar 1930-an dan stagflasi yang berlangsung sekarang ini, membuktikan bahwa teori "*general equilibrium*" tidak mampu menjelaskan krisis ekonomi yang berkepanjangan, karena dalam konjungtur atau "*bussiness cycle*" jangka panjang keadaan ketidakseimbangan lebih dominan ketimbang keseimbangan.

Ketiga, preferensi (*subyektif*) kekuatan yang selalu sama. Jika terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik (monopoli, oligopoli) maka hal ini akan diabaikan, atau dianggap tidak berlaku. Sementara itu, skala preferensi biasanya dianggap sebagai "nomor urut". Meskipun dalam kurva-kurva isokuan teori "ekonomi mikro" dan teori "permainan" (*game theory*) misalnya, diperkenankan permodelan dengan bilangan kardinal, tetapi pertanyaan "preferensi itu didasarkan atas apa?" tidak pernah terjawab.

Terakhir, interaksi dan tanggapan para pelaku ekonomi berwatak rasional. Ukurannya adalah terukur, terbilang dan berada dalam kondisi kepastian yang mutlak. Jika terjadi irasionalitas, misalnya karena selera konsumen tidak sesuai dengan penawaran, maka model ekonomi neo-klasik ini menganggapnya sebagai "*patologis*" atau tak sesuai. Justru dalam kondisi perekonomian dewasa ini, akan selalu mengalami kasus di mana "*rational expectation*" tak dapat dilakukan. Contoh kasus menurunnya harga minyak dunia pada dasawarsa 80-an merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dari perkiraan pada awal dasawarsa 1970-an.

Sementara itu Tinker (1980) melakukan kritik atas penerapan ekonomi neo klasik berkenaan dengan praktek akuntansi. Tinker menyimpulkan bahwa teori ekonomi neo klasik dan praktek akuntansi khususnya sarat dengan nilai-nilai marginalisme, sehingga distribusi pendapatan atas terjadinya aktivitas ekonomi di

suatu negara yang disokong oleh korporasi terbukti lebih banyak menguntungkan pihak *stakeholder* dibandingkan dengan tenaga kerja.

Hal itu dipertegas oleh Tinker (1980:151) dalam analisis fungsi produksi dalam perekonomian negara. Menurut hasil pengamatannya menunjukkan bahwa kombinasi yang setara antara tenaga kerja (L) dengan modal (C) dalam menghasilkan pendapatan negara hanya berlaku pada saat proses menghasilkan output nasional. Oleh karena itu, kesetaraan tersebut tidak berlaku pada saat dilakukan distribusi pendapatan nasional. Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neoklasik (marginalisme) tersebut, pemilik modal (C) memperoleh porsi distribusi pendapatan nasional yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja (L).

Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa dalam ekonomi neo klasik memiliki kelemahan yang mendasar khususnya jika dikaitkan dengan realitas yang ada dalam

perkembangan dunia ekonomi. Oleh karena itu perlu ada sebuah landasan ekonomi yang lain yang bisa menjawab dengan lebih lapang dan jernih atas beberapa kelemahan mendasar tersebut. Ekonomi politik klasik (*Classical Political Economy*) sebagai hasil auto kritik atas teori ekonomi neo klasik oleh karena itu diharapkan mampu menjawab setiap kelemahan yang ada.

BAB 3

Ekonomi Politik

3.1. Ekonomi Politik Klasik Solusi Atas Kelemahan Neo Klasik

Ekonomi politik klasik merupakan pendekatan alternatif yang sebenarnya memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang. Pendekatan ekonomi politik klasik memiliki fokus perhatian bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan “*who get what, when, how and how much*”. Persoalan yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang menggabungkan ekonomi dengan dimensi-dimensi sosial lainnya. Ekonomi politik klasik hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa dimensi lain.

Berbeda dengan pendekatan neo klasik, ekonomi-politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode impretivis dan instropektif,

ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Mengenai hakekat manusia, pendukung pendekatan ekonomi-politik klasik yakin bahwa perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantropi, moralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diimbangi dengan rasa tanggungjawab sosial. Pasar, menurut pendekatan ekonomi-politik, bukan lembaga sosial yang paling penting. Banyak proses produksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga sosial lain, seperti keluarga dan birokrasi.

Sebagai misal, proses produksi beras, gula, baja, semen, mobil, dan berbagai produk penting lain di suatu negara ternyata tidak bertumpu pada mekanisme pasar. Bahkan beberapa keputusan birokratik atau beberapa

yang lain dihasilkan hanya melalui pertemuan keluarga presiden. Karena itu, yang diutamakan oleh pendekatan ekonomi-politik adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan, dan manifesto sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi. Dalam praktek, lembaga-lembaga itu memang sering dipakai oleh banyak orang untuk memproduksi kemakmuran.

Sebagai pendekatan alternatif, teori ekonomi politik klasik sebagaimana digunakan dalam teori PEA oleh Tinker (1980) memang merupakan pendekatan yang menilai pesimistis terhadap konsep mekanisme pasar. Pendekatan teori ekonomi politik klasik lebih berupaya untuk mengombinasikan beberapa mekanisme ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan Smith bahwa mekanisme pasar bukanlah sesuatu yang salah karena mekanisme pasar tidak bertujuan untuk membuat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, namun demikian bertujuan membebaskan masyarakat pada saat

itu dari ketergantungan terhadap lembaga yang ada. Sedangkan di sisi lain, mekanisme pasar tersebut bukan mekanisme yang universal, sehingga harus ditopang oleh sebuah otoritas legal yang bisa mengambil alih atau setidaknya memperbaiki mekanisme pasar ketika mekanisme pasar tersebut tidak dapat berjalan secara sempurna.

Berpijak pada realitas inilah, para penganut ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang merupakan penerus mahzab radikal tersebut, secara rasional menganggap bahwa negara dalam hal-hal tertentu harus berdampingan dengan pasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini bermakna bahwa ketika negara tidak bisa menjangkau aktivitas ekonomi tertentu, maka domain tersebut menjadi milik pasar; sebaliknya ketika terjadi kegagalan pasar atau telah menyangkut wilayah publik, maka negara wajib masuk untuk membuat regulasi atau dalam batas-batas tertentu ikut berperan sebagai pemain.

3.2. Ekonomi Politik Sebagai Konsep Tanpa Batas Disiplin

Ekonomi politik didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat supradisiplin (*supradisciplinary approach*) atau melampaui batas-batas disiplin. Fokus analisisnya adalah pada setiap isu ataupun kebijakan, yang baik langsung atau tak langsung melibatkan kepentingan publik. Sudah barang tentu tergantung pada ruang lingkup dan kedalaman analisisnya, ekonomi politik bisa saja membicarakan isu-isu pada tingkat individu, kelompok ataupun gabungan dari keduanya dan analisis yang dilaksanakan itupun bisa menjangkau pada aras (level) mikro atau makro. Jadi ekonomi politik ini merupakan bidang kajian yang untuk sebagian besar diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan ekonomi politik pada dasarnya menyangkut keputusan-keputusan politik (*political decisions*) mengenai

kondisi tertentu yang dihadapi oleh negara misalnya dalam kondisi ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan manusia.

Selanjutnya Uphoff dan Ilchman (1972) mengungkapkan bahwa ilmu sosial itu terkait erat tentang pilihan publik. Hal ini bersangkutan dengan hal-hal yang bersifat politis karena yang dibahas adalah persoalan penggunaan kekuasaan dan persaingan untuk memperoleh kewenangan kekuasaan itu dalam masyarakat. Terkait dengan ekonomi karena yang dibicarakan adalah alokasi serta pertukaran sumber-sumber daya langka, baik sumber daya politik dan sumber daya sosial maupun sumber daya yang secara umum biasa dikategorikan sebagai sumber daya ekonomi.

Kajian ekonomi politik ini adalah untuk mengembangkan proposisi-proposisi mengenai kemungkinan hasil akhir dari proses pertukaran sumber-sumber, baik yang bersifat non ekonomis (sosial dan politik) maupun yang bersifat ekonomi. Jadi dapat dijelaskan secara rasional berbagai hal bukan saja mengenai bagaimana

sebuah sistem-sistem ekonomi politik tertentu senyatanya bekerja, tetapi juga mengenai bagaimana sistem-sistem itu seharusnya bisa bekerja dan bagaimana sistem itu dapat diperbaiki kinerjanya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (*policy goals*) yang jauh lebih baik. Tujuan-tujuan kebijakan yang dimaksud misalnya, apakah dirumuskan secara umum untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, kemakmuran, pemerataan (distribusi pendapatan) ataupun sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada aspek tujuan ini maka dengan mudah bisa melihat betapa sifat analitik, terapan dan evaluatif penilaian dari kajian ekonomi politik ini. Karena ciri evaluatifnya ini maka dengan sendirinya ekonomi politik menjadi suatu bidang kajian atau pendekatan yang mau tidak mau akan senantiasa bersinggungan dengan masalah sarat dengan nilai (*value loaded*), bukan bebas nilai (*value free*).

Lebih lanjut melalui kajian dengan menggunakan perspektif ekonomi politik akan dapat pula ditelusuri apa yang sekiranya menjadi alasan atau latar belakang pemikiran (*rasionalitas*) dan apa agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) atau rejim yang berkuasa, sejauh hal ini menyangkut masalah perhitungan biaya (*costs*) dan manfaat (*benefits*) dari kebijakan tertentu atau keputusan-keputusan yang telah diambil terhadap masalah atau sektor pembangunan tertentu.

Dengan menggunakan logika seperti ini maka ekonomi politik sebenarnya dapat pula dipandang sebagai studi atau analisis kritis mengenai aspek atau dimensi ekonomis dari setiap kebijakan publik (*the economy of public policy*). Dipandang sebagai kajian ekonomi atas kebijakan publik inilah maka biasanya ada sejumlah pertanyaan khas bermuatan politis yang selalu diajukan yaitu *who gains, who losses, and how* (Staniland, 1985).

3.3. Ekonomi Politik Sebagai Alat Menginterpretasi Fenomena

Dalam mengkaji fenomena pembangunan ekonomi termasuk keputusan-keputusan kebijakan pembangunan ekonomi dan di sektor bisnis senantiasa perlu berangkat dari pendekatan ekonomi politik (*political economy approach*). Tampaknya tidak cukup mengkaji persoalan pembangunan hanya bersandar pada pendekatan ekonomi saja sebagaimana banyak dilakukan oleh para ekonom.

Beberapa hal yang mendasari pertimbangan diatas adalah bahwa *pertama*, untuk mengetahui mengapa dan dengan cara bagaimana kebijakan pembangunan termasuk kebijakan ekonomi dan bisnis disuatu negara, dirumuskan dan kemudian diimplementasikan (dengan berbagai cara), tidak akan dapat memahami dengan benar jika hanya melihat dari satu sudut pandang - secara deterministik, seolah dengan itu lantas bisa memperoleh sebuah

gambaran yang lengkap. Sebagaimana dipahami bahwa perumusan kebijakan pembangunan itu pada dasarnya merupakan proses politik dan lazimnya melibatkan beragam aktor (negara, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat/LSM, dan masyarakat). Masing-masing aktor tentu memiliki kepentingan tertentu, baik tersembunyi atau terang-terangan yang satu dengan yang lain dalam interaksinya mungkin bisa jadi saling berbenturan (*conflict of interest*).

Dalam dunia politik untuk mencapai hasil yang maksimal (*win-win solution*) para aktor dituntut untuk melakukan *trade-off* dalam berbagai bentuk negosiasi dan kompromi. Dengan demikian untuk memahami kebijakan pembangunan dengan benar perlu ditelusuri secara cermat perilaku, motivasi ataupun preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban : *siapa memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana* dari kebijakan pembangunan yang berlangsung disuatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Dengan berpangkal tolak pada perspektif ekonomisme berarti, langsung atau tidak langsung telah mempanglimakan, sebab semata-mata menilai kebijakan pembangunan ekonomi sebagai fenomena ekonomi semata dan dengan menggunakan ukuran-ukuran serba ekonomi. Dengan demikian misal hanya melihat sebagai bagian integral dari proses alokasi dan pertukaran sumber daya langka (politik atau sosial). Sebaliknya juga hanya berpikir secara deterministik dan karenanya tidak akan memperoleh wawasan yang benar (*comprehensive*), jika melihat kebijakan pembangunan hanya secara politikisme atau hanya mempanglimakan faktor politik. Dengan cara pandang demikian berarti akan melihat fenomena kebijakan pembanguna itu dari sudut pandang politik semata. Secara sadar atau tidak hal ini akan mereduksi makna pembangunan, misalnya memperlakukannya sekedar sebagai persoalan diseputar kekuasaan atau persaingan

untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat.

Pandangan yang agaknya cukup memuaskan adalah yang mensintesiskan keduanya. Dalam arti mensintesiskan dua perspektif yaitu dari perspektif politik dalam arti umum dan perspektif ekonomis. Pemikiran semacam ini secara akademis bisa diterima, logis dan seimbang. Keseimbangan itu bisa dicapai jika melihat fenomena pembangunan itu baik proses maupun dampaknya secara interaktif. Dalam konsep Staniland (1985) cara pandang yang bersifat interaktif ini mengandung arti bahwa hendaknya memperlakukan *politics and economics as being functionally distinguishable but involved in exchange and reciprocal influence*. Konsep senada juga dikemukakan Zald (1970) bahwa ekonomi politik sebagai *the study of the interplay of power, goals of power-wielders and productive exchange system*.

Dengan demikian dalam menyoroti dampak tertentu dari fenomena kebijakan

pembangunan ekonomi semisal krisis ekonomi/moneter maka tidak memperlakukan sekadar sebagai persoalan yang berakar pada faktor ekonomi dan kemudian mencari upaya penyelesaiannya hanya dari segi teknis ekonomi, melainkan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dengan melihat hubungan tarik menarik (*interaktive*) antara pengaruh faktor-faktor ekonomi (*productive exchange*) dan politik (*power*). Disinilah tampak arti penting dari pemanfaatan pendekatan ekonomi politik yang bersifat holistik sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai isu atau fenomena sosial, sejauh hal itu menyangkut persoalan proses kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam ilmu sosial yang relatif telah tua usianya pendekatan ekonomi politik menawarkan sebuah pandangan akademis yang cukup atraktif. Daya tarik pendekatan ekonomi politik itu terletak pada cara memandang fenomena pembangunan atau perubahan sosial (*social change*) dari dua

perspektif pertama ekonomi yaitu yang menyandarkan pada kekuatan pasar (*market mechanism*) dan kedua politik yaitu bersandar pada digunakannya mekanisme kekuasaan (*political mechanism*) yang analisis terhadap negara senantiasa dilakukan dengan cara melihatnya baik sebagai agency (aktor) maupun sebagai struktur. Dengan demikian secara metodologis, pendekatan ekonomi politik berusaha mencari kejelasan hubungan antara perilaku ekonomi dengan perilaku politik (Wahab:1999).

3.4. Ciri-Ciri Ekonomi Politik

Disadari bahwa persoalan Ekonomi Politik Klasik sudah jauh berbeda dengan persoalan Ekonomi Politik masa kini. Sebabnya bahwa Ilmu Ekonomi Politik dengan paradigmanya yang baru tidak hanya terpaku pada bentuk dan fungsi pasar dengan model persaingan sempurna saja atau persaingan bebas dalam konsep Ekonomi Politik Konvensional yang teoritis dengan gambaran-

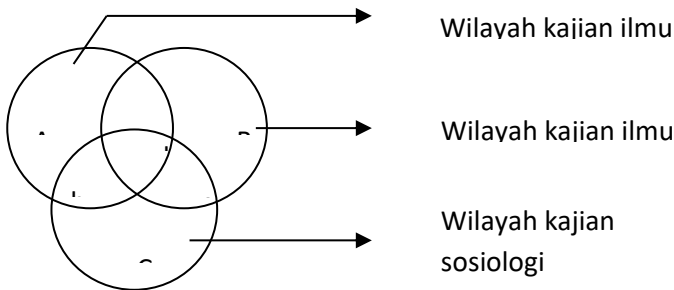
gambaran abstrak belaka Masalah-masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Politik Modern sudah sampai kepada persoalan berbagai faktor yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar domestik maupun internasional yang tidak semata-mata bersifat *pure* ekonomi belaka. Banyak hukum Ekonomi Konvensional khususnya yang sudah tertinggal di belakang layar. Bahkan hal-hal yang irasional, yang dikupas dalam studi Ekonomi Politik kontemporer pun turut pula mempengaruhi terbaliknya dalil-dalil Ekonomi Konvensional itu. Oleh karenanya, terlihat bahwa ekonomi politik modern amat fleksibel sebagai suatu *disiplin, kajian studi, pendekatan* atau *alat-alat analisis* yang dapat merambat ke bidang-bidang lain, yang justru sukar untuk dilakukan oleh disiplin-disiplin lain termasuk ilmu ekonomi dan ilmu politik itu sendiri (Ikbar, 2006).

Pada dasarnya ekonomi politik merupakan serangkaian tali hubungan yang bersifat saling mempengaruhi atau saling berhubungan dan kait-mengkait di antara subjek dan objek dari variabel-

variabel dasarnya terutama variabel-variabel yang berfaktor dari ekonomi, politik dan sosial masyarakat (Gambar 3.1).

Gambar 3.1

Batas dan Wilayah Kajian Ekonomi Politik



Sumber: Ikbar, (2006: 23)

Keterangan:

- A = Wilayah kajian ilmu ekonomi
- B = Wilayah kajian ilmu politik
- C = Wilayah kajian sosiologi
Kemasyarakatan, lingkungan dan lainnya
- abc = Ekonomi Politik
- a = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke B,C,A
- b = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke C,B, A
- c = sudut yang menjadi faktor hubungan timbal balik ke A, B, C

Dari ciri-ciri dan karakteristik khas yang tampak sekurang-kurangnya Ekonomi Politik memiliki (1) Sekurang-kurangnya ada unsur penggabungan dari dua atau lebih kutub utama keilmuan, yakni dalam hal ini Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik, yang secara timbal balik saling mempengaruhi dari interaksi dan tingkah laku masing-masing maupun proses mekanisme kerja keduanya, dan kemudian terjadi lagi umpan balik yang mengimbas pada masyarakat, (2) terdapat perspektif khusus dalam telaahnya menyangkut usaha pemahaman terhadap sistem internasional kontemporer dalam konteks hubungan saling mempengaruhi antara tatanan sistem ekonomi internasional dan tatanan politik internasional yang rumit, indeterminasi (labil, tidak menentu dan penuh ketidakpastian), interdependensi keilmuan yang berbentuk interdisiplin dengan pendekatan yang bersifat eklektik, (3) ada usaha-usaha yang khas dari metode pendekatannya yang interdisipliner

tersebut berupa telaah terhadap subjek negara dan bukan negara, juga objek masalah negara dan bukan melalui berlangsungnya suatu proses tertentu dari mekanisme pasar (tawar-menawar yang menentukan pada arus barang dan jasa) dengan faktor-faktor kekuasaan yang mempengaruhi atau sebaliknya. (4) kemudian bahwa keterlibatan pemerintah/negara berupa pelaksanaan kekuasaan/kekuatan politik dalam politik luar negeri, hukum (pengaturan-pengaturan) dan ketentuan-ketentuan nasional dan internasional diluar perspektif ekonomi, menjadi perhatian penting, (5) demikian pula dengan adanya peranan aktor bukan negara secara kontemporer kian meluas terutama menyangkut interaksi institusi dan personal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan politik sebagai kekuatan diplomasi tawarnya (*bargaining position*) dengan aktor lainnya termasuk para pemimpin dalam hubungan internasional menyangkut masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, lingkungan,

ekosistem, gender, globalisasi, demokratisasi, hak-hak azasi manusia, dan sebagainya, (6) bahwa wilayah kajian Ekonomi Politik secara komprehensif telah begitu meluas dan melampaui batas-batas klasik negara-negara di dunia karena sumbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi serta transformasi sosial lainnya, (7) adanya telaah perspektif global khususnya menurut penstudi / kaum reformis dalam Ekonomi Politik menyangkut filosofis dasar keilmuan melalui cara *kausalitas*, *korelasional* dan *perkaitan* dari suatu peristiwa ekonomi dan politik, merupakan model penyederhanaan logis untuk memahami hubungan interaktif dan timbal balik, (8) ekonomi politik terbuka untuk suatu diskusi dan perdebatan keilmuan yang masih dipandang kontroversial baik oleh para pakar Ilmu Ekonomi konvensional maupun para pakar ilmu sosial lainnya.

3.5. Pola Analisis Ekonomi Politik

Ekonomi politik berkaitan dengan seperangkat teori dan konsep yang berkenaan dengan mekanisme pasar, dalam hal ini dapat pula dipinjam dari ilmu ekonomi atau juga politik seperti kekuatan-kekuatan yang berperan dalam interaksi politik negara-negara satu dan lainnya. Begitu pula dengan subjek-subjek keilmuan lain. Sebagai ilustrasi, Politik Ekonomi Moneter dengan konsep *devaluasi*, merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menurunkan kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing tertentu. Sejumlah pertanyaan yang dapat dikemukakan menyangkut hal ini misalnya (1) mengapa pemerintah membuat kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mendasarinya, (2) untuk apakah kebijakan itu dibuat dan bagaimana konfigurasi kebijakan tersebut, (3) sejauh manakah efek dan atau umpan balik yang timbul terhadap kehidupan masyarakat, (4) variabel-variabel yang berpengaruh atau yang dominan mempengaruhi

terjadinya kebijakan tersebut serta, (5) hubungan kebijakan tersebut dengan fenomena lain yang ada.

Maka dengan pendekatan ekonomi politik persoalan tersebut dapat dianalisis dengan pola sebagaimana dalam Tabel 3.1. Implementasi konsep/teori ekonomi politik dapat diterangkan pada dua sisi, yang pertama analisis tidak akan terhenti dari sekumpulan variabel atau parameter ekonomi saja pada saat mencoba memahami suatu peristiwa ekonomi yang sedang terjadi. Upaya yang dilakukan adalah penyelidikan terhadap aktor-aktor atau unit politik/ekonomi yang terlibat dalam gerakan dari variabel tersebut sebagai faktor dependen atau independen sebagai subjek disamping mungkin pula struktur sosial dan lainnya yang menghubungkan masing-masing aktor.

Variabel disini adalah sekumpulan fakta dari sesuatu yang dihasilkan oleh sejumlah tindakan para aktor yang berada di belakang varai-an-varian yang tengah dimatai/diperhatikan.

Kedua adalah sisi lain bentuk aksi atau tindakan ekonomi yang diambil dari aktor-aktor itu saat dilakukan kegiatan politik. Bahwa dibelakang tindakan-tindakan politik oleh para aktor tersebut tentu terdapat motivasi untuk ekonomi sebagai landasan dari kegiatan atau aktivitasnya.

Tabel 3.1

Pola Analisis Ekonomi Politik

Metode	Implementasi Konsep / Teori	Masalah Yang Dihadapi	Faktor-Faktor Berpengaruh
Pendekatan Ekonomi Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Alat analisis ekonomi politik dalam implementasi dan perspektif yang berasal dari teori politik untuk memahami ekonomi - Alat analisis ekonomi politik sebagai implementasi dari perspektif yang bersumber pada teori ekonomi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel-variabel politik Variabel-variabel ekonomi Variabel-variabel Sosial, budaya dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi pemerintah - Perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi, dan lain-lain - Kenaikan harga-harga di pasar - Kemerosotan daya beli masyarakat - Langkanya sumberdaya dan lain-lain. - Revolusi sosial , transformasi industrial - Reformasi dan kemajuan ilmu dan teknologi,

	memahami permasalahan politik dan sosial		komunikasi dan informasi
--	------------------------------------------	--	--------------------------

Sumber: Ikbar, (2006: 31)

Dari analisis-analisis yang didasarkan atas kedua sisi tersebut terlihat unsur-unsur pengaruh, saling hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel. Misalnya bahwa akan terlihat faktor-faktor atau adanya sesuatu yang khas yang tidak terduga oleh analisis dalam ekonomi sebagai hal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan atau dari faktor politik yang berpengaruh terhadap kehidupan pasar atau terhadap kehidupan ekonomi sosial/kemasyarakatan.

3.6. Ekonomi Politik Sebagai Unit Sistem Sosial

Sistem sosial di sini adalah *hubungan saling tergantung* antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor bukan ekonomis. Faktor bukan ekonomis itu di antaranya

ialah sikap-sikap masyarakat dalam menghadapi kehidupan, pekerjaan dan kekuasaan, struktur administratif dan birokrasi pemerintahan ataupun swasta, pola-pola pertanian keluarga dan keagamaan, tradisi kultural, sistem-sistem pemakaian tanah atau lahan, otoritas dan integritas badan-badan pemerintah tingkat peran serta keputusann-keputusan dan kegiatan-kegiatan pembangunan, fleksibilitas dan rigidit;js (kekakuan) kelompok-kelompok ekonomi dan sosial masyarakat tersebut (Todaro, 1983: 47).

Sebagaimana disebut Todaro, perlu ditinjau secara seksama bagaimana sesungguhnya hubungan Ekonomi Politik yang juga merupakan suatu hubungan kesalingtergantungan antara faktor ekonomis dan faktor bukan ekonomis (*baca: politis*) dengan sistem sosial, yang juga mempunyai mempunyai kepedulian yang besar terhadap sasaran pembangunan dan pemecahan masalah pembangunan atau pertumbuhan negara. Selain itu didapati banyak kekeliruan

analisis ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari karena tidak memberikan proses penelaahan secara utuh tentang faktor-faktor bukan ekonomi yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi atau mekanisme ekonomi.

Tidak secara keseluruhan pengertian sistem sosial yang dipandang sebagai faktor bukan ekonomis yang berpengaruh atas kekuatan sistem, mekanisme, dan pemikiran-pemikiran ekonomi politik diamati. Namun, beberapa persoalan yang pada peringkat sosial patut diselidiki berkenaan dengan hubungan-hubungan antara ekonomi dengan aspek-aspek tertentu saja dari lingkungan sosio-kulturnya yang di telaah, di antaranya (1) Faktor-faktor kebudayaan, khususnya mengenai peranan ekonomis dari nilai-nilai ideologi, (2) Hubungan ekonomi dengan berbagai bagian dari lingkungan politik dalam perspektif struktur politik, kekuasaan dan kelompok kepentingan, (3) Faktor integratif menyangkut peranan ekonomis dari tipe kelompok solidaritas kekeluargaan dan kesukuan,

(4) Faktor stratifikasi sosial berkenaan dengan peringkat personal, kedudukannya dalam lapisan masyarakat berpengaruh atas kehidupan ekonomi - atau saling mempengaruhi.

Sebagai sebuah sistem sosial maka secara umum dapat dipahami adanya pertalian erat antara dunia politik dan dunia ekonomi, tetapi sejauh manakah proses pendekatan multidisiplin atau lebih tepatnya pendekatan interdisiplin-nya mampu menerangkan kepada semua pihak tentang adanya hubungan yang signifikan antara keduanya itu. Bahkan pada sementara kalangan banyak yang menyangsikan eksistensi ekonomi politik karena mereka melihat ada kesukaran kaum intelektualnya untuk memecahkan masalah-masalah pertentangan radikal yang terjadi pada perspektif kedisiplinan induk, yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik. Perbedaan mendasar terletak pada hakikat paradigma Ilmu Politik yang menekankan pengkajian tentang kekuasaan/kekuatan (*power*), dan sebaliknya Ilmu Ekonomi pada

mekanisme pasar (*market*) terutama oleh aliran bukan Marxian. Padahal, dari kedua disiplin akar itu terdapat "dialektika" yang ekstrem untuk dipadukan karena kompleksitas dan heterogenitas hubungan keduanya. Oleh karenanya dianggap banyak kegagalan yang dialami oleh para penstudi dan pakar-pakarnya dalam merumuskan teori umum (*grand theory*) yang dapat memuaskan segenap pihak.

BAB 4

Political Economy of Accounting (PEA)

4.1. Pengertian Political Economy of Accounting (PEA)

Political Economy of Accounting (PEA) merupakan salah satu dari pendekatan teori kritik (*critical theoretical approaches*). PEA ini pertama kali diperkenalkan oleh Tinker (1980) dalam artikelnya yang berjudul “*Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the cambridge controversies*”. Sebagai penggagas PEA Tinker memiliki pandangan bahwa teori dan praktek akuntansi senantiasa akan dipengaruhi oleh teori tersebut. Namun demikian dalam realitasnya teori dan praktek akuntansi tersebut hanya dipandang dari aspek ekonomi saja sedangkan aspek lainnya tidak di libatkan didalamnya. Padahal menurut pandangan Tinker angka-angka akuntansi yang merupakan cermin dari hasil kinerja keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan

merupakan refleksi dari situasi dan kondisi yang terjadi saat mulai disusun hingga berakhirnya penyusunan laporan keuangan. Situasi dan kondisi tidak hanya yang terjadi didalam internal perusahaan namun juga yang terjadi di eksternal perusahaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian Tinker (1980, 1984, 1988) secara keseluruhan berupaya melakukan sebuah evaluasi atas aspek-aspek fundamental yang tercakup dalam pemikiran ekonomi neo klasik. Dia menilai bahwa didalam konsep pemikiran ini banyak terdapat kelemahan khususnya sebagai dasar dalam mengembangkan praktik akuntansi selama ini, dan selanjutnya diberikan suatu alternatif pemikiran dengan menggunakan *classical political economic* sebagai dasar dalam mengembangkan praktik akuntansi. Harapan dari pendekatan alternatif ini (PEA) adalah bahwa dengan memahami kinerja perusahaan yang melibatkan perspektif politik dalam kerangka ekonomi politik maka akan dihasilkan sebuah

analisis yang lebih komprehensif dan lebih tepat, dikarenakan setting politik yang ada pada saat menghasilkan kinerja keuangan turut pula diketahui sebagai dasar dalam menyusun kinerja tersebut. PEA mencoba untuk menghadirkan sebuah kajian yang menghubungkan antara perspektif ekonomi dan politik didalam menganalisis suatu realitas perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan. PEA dengan demikian berupaya untuk memahami dan mengevaluasi fungsi akuntansi dalam konteks lingkungan ekonomi, sosial dan politik dimana akuntansi tersebut di terapkan.

Tinker (1980) sebagaimana diringkas dalam Tabel 3.1. dibawah selanjutnya menjelaskan adanya dua macam perbedaan antara ekonomi neo klasik dan ekonomi politik klasik. Perbedaan pertama berkaitan dengan masalah laba, dimana pada teori ekonomi politik klasik laba dimaknai sebagai tingkat pengembalian modal (*return to capitalists*)

kepada pemilik modal. Sedangkan pendekatan ekonomi neo klasik mengartikan laba sebagai indikator dari efisiensi produksi. Dalam ekonomi neoklasik (marginalisme), tenaga kerja diposisikan sebagai bagian dari pemilik modal, dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan pekerja merupakan tindakan bersama dalam rangka mencapai efisiensi yang telah ditargetkan.

Tabel 4.1
Pemaknaan Laba

	Neo Classical Economics (Marginalism)	Classical Political Economy
Pemaknaan laba	Merupakan indikator dari efisiensi ekonomi	Pengembalian modal
Penjelasan teori atas penentuan tingkat laba	Teori produktivitas marginal memfokuskan pada kekuatan produksi	Analisis politik dan sosial yang memfokuskan pada hubungan sosial dari produksi

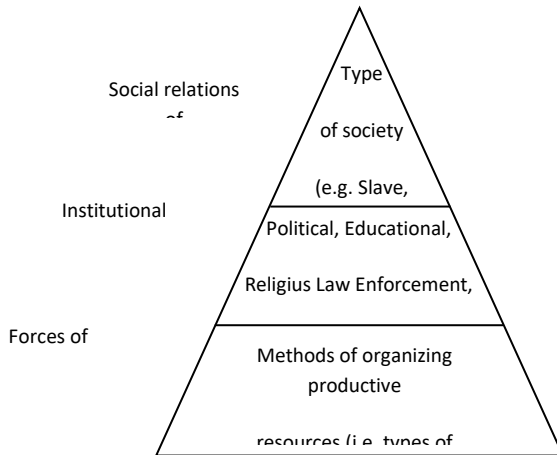
Sumber: Tinker, (1980: 148)

Pemahaman laba diatas mengandung maksud bahwa efisiensi yang sebenarnya merupakan tujuan akhir pengembalian modal

pemilik menjadi sebuah pemahaman sebagai tujuan bersama yang harus dicapai oleh seluruh bagian dalam perusahaan. Namun sebaliknya dalam teori ekonomi politik klasik laba merupakan tingkat pengembalian kepada pemilik modal. Selain itu, dalam penentuan tingkat laba dikarenakan laba merupakan indikator dari efisiensi produksi maka dalam teori ekonomi klasik laba dipahami sebagai perhitungan selisih antara jumlah input dibandingkan jumlah output dalam proses produksi.

Berdasarkan pemahaman ini, maka untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi, maka perlu dilakukan cara untuk menekan biaya faktor produksi maupun kuantitas faktor produksi dalam rangka pencapaian return dari pemilik modal. Adapun menurut pemahaman dalam teori ekonomi politik klasik penentuan tingkat laba diperoleh dengan cara lebih memfokuskan pada relasi sosial dalam proses produksi di perusahaan. Artinya bahwa penentuan laba tidak semata-mata memandang dari selisih input dan

output namun namun lebih luas hingga pada seberapa jauh hubungan sosial yang timbul dari adanya proses produksi dalam sebuah perusahaan.



Gambar 4.1

Dua Konsep dan Keterkaitan Modal

Perbedaan kedua menyangkut masalah modal sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4.1. Dalam gambar dijelaskan bahwa menurut teori ekonomi politik modal memiliki dua dimensi yaitu, sebagai instrumen dari produksi dan kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam organisasi sosial. Dalam teori ekonomi politik dimensi modal pertama merupakan pemaknaan modal sebagai sebuah kekuatan dari ekonomi (*economic force*) dalam melakukan proses produksi. Sedangkan dimensi kedua dijelaskan pengertian modal sebagai proses hubungan-hubungan sosial dari produksi (*the social relations of production*). Dimana hubungan-hubungan sosial dari produksi ini bisa direfleksikan dari adanya keragaman lembaga sosial yang ada antara lain lembaga hukum, negara, pendidikan, agama, politik, sosial dan lembaga administrasi negara). Keberadaan lembaga-lembaga sebagaimana disebut diatas sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak dan

kewajiban setiap manusia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Seluruh hal diatas dapat menentukan dan mewarnai atas sistem ekonomi yang akan digunakan. Perbedaan berbagai macam kehidupan sosial (feodal, kapitalis, perbudakan dan lainnya) dicirikan dengan berbagai macam hubungan sosial yang berbeda dan oleh karena itu maka terdapat pengaturan institusi yang berbeda pula. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa memahami proses sosial dan politik (hubungan sosial) dibutuhkan untuk menginterpretasikan kinerja ekonomi secara lebih komprehensif. Artinya bahwa dengan pemahaman seperti ini, maka sekaligus ingin menegaskan kembali bahwa mekanisme pasar bukanlah mekanisme yang paling efektif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat mengakomodir dan menjamin hak kepemilikan manusia.

Adapun Cooper dan Sherer (1984) meneliti tentang nilai dari laporan keuangan perusahaan dalam perspektif PEA. Hal yang melatarbelakangi riset Cooper dan Sherer ini adalah bahwa berdasarkan analisis ternyata laporan keuangan dikembangkan lebih banyak disusun untuk memenuhi kepentingan segelintir pemilik modal saja dan cenderung mengabaikan kepentingan dari stakeholders lainnya. Selanjutnya Cooper dan Sherer berupaya mencoba untuk merubah pola kajian dengan memasukkan nilai-nilai lain selain ekonomi untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sesungguhnya laporan akuntansi suatu perusahaan (negara) dikembangkan. Oleh karena itulah maka PEA dirasa sangat pas untuk diterapkan mengingat PEA juga mengedepankan riset akuntansi dalam konteksnya.

Sehubungan dengan itulah maka Cooper dan Sherer (1984:217) memaknai PEA sebagai pengertian secara makro dan secara mikro. Secara makro PEA ditempatkan sebagai

kerangka pikir untuk merekonstruksi teori akuntansi. Dengan cara inilah maka nilai-nilai ekonomi neoklasik bisa tergantikan dengan nilai-nilai yang melekat pada teori ekonomi politik klasik. Adapun pada pengertian secara mikro PEA ditempatkan sebagai metodologi yang berfungsi menelaah secara kritis kinerja korporasi, baik dilihat secara internal maupun relasinya terhadap struktur kekuasaan negara dan juga global. Selain itu PEA juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang hubungan ekonomi politik berdasarkan data-data akuntansi dari berbagai perusahaan pada suatu negara ataupun lintas negara, selain itu bisa menjadi instrumen untuk menilai proses distribusi kesejahteraan dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Dengan demikian maka PEA akan lebih mudah jika dimanfaatkan dalam memberikan kontribusi besar untuk membuat sebuah rekonstruksi secara komprehensif dan rasional terhadap sebuah teori akuntansi yang berlaku saat ini.

4.2. Karakteristik Political Economy of Accounting (PEA)

Cooper dan Sherer (1984:218-219) mempunyai pandangan bahwa PEA memiliki karakteristik antara lain pertama, bahwa dalam studi akuntansi perlu mengakui keberadaan kekuasaan dan konflik dalam masyarakat berkenaan penilaian kinerja perusahaan (akuntansi). Dengan demikian maka dapat dipahami bagaimana distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Artinya bahwa pemahaman ini bertolak belakang dengan pemahaman dalam ekonomi neo klasik khususnya dimana kinerja korporasi dianggap hanya sebagai aktivitas ekonomi semata dan terpisah dari aktivitas lain. Dengan pemahaman realitas menurut PEA ini maka bisa digunakan sebagai alat analisis yang lebih komprehensif jika digunakan sebagai alat analisis hubungan ekonomi politik dan juga

distribusi pendapatan atas perusahaan negara khususnya.

Karakteristik kedua adalah bahwa PEA juga mendorong penelitian-penelitian dibidang akuntansi sesuai dengan konteksnya. Artinya bahwa dalam penelitian akuntansi diperlukan pemahaman akan ekonomi politik serta kondisi sosial dimana akuntansi berada dan dipraktekkan. Dengan kata lain bahwa PEA berusaha menganalisis bagaimana sejarah dan proses yang berjalan hingga suatu kegiatan perusahaan bisa muncul. Hal ini dikarenakan struktur kekuasaan tidak akan bisa mempengaruhi perusahaan ketika tidak ada aturan main (regulasi, baik secara formal maupun secara informal) yang dapat dijadikan alas oleh korporasi dalam aktivitas operasionalnya. Selain itu, ketiadaan aturan main juga akan mengaburkan distribusi pendapatan atas kinerja maksimal korporasi. *Political economy of accounting* akan memperlakukan nilai sebagai bagian yang sangat esensial, dimana laporan

akuntansi diterapkan dalam kepentingan tertentu (misalnya kelompok elite atau klas tertentu). Pandangan nilai sosial laporan akuntansi Cooper dan Sherer (1984) ini menyatakan bahwa riset akuntansi senantiasa perlu mencerminkan konteks sosial, ekonomi dan politis di mana akuntansi diterapkan. Kegagalan untuk mempertimbangkan konteks ini akan mendorong penekanan desain laporan akuntansi yang mengutamakan kepentingan pemegang saham, dan tidak mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan karakteristik ketiga adalah bahwa PEA akan lebih mendorong pemahaman fungsi akuntansi yang lebih dinamis dalam masyarakat dan menganggap bahwa terjadi saling mempengaruhi antara akuntansi dan lingkungannya. Dengan kata lain bahwa kebijakan akuntansi senantiasa dilandasi oleh motivasi yang ada pada dalam diri manusia. Pemahaman ini merupakan hal yang penting, karena pertimbangan mengenai motivasi

manusia dalam memperoleh kesejahteraan dan akumulasi kekayaan.

Perspektif *political economy of accounting* selanjutnya juga digunakan dalam menelaah reformasi akuntansi di Indonesia oleh Rosser (1999). Hasil analisis menyatakan bahwa di negara berkembang umumnya dan di Indonesia pada khususnya sistem akuntansi cenderung diasumsikan tidak bisa lepas dari karakter barat. Hal ini sesuai pandangan sarjana perspektif *neoclassical/modernisasi* yang menyatakan bahwa negara berkembang akan bergeser menjauh dari praktek akuntansi tradisional ke arah barat karena tidak cocok dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kompleksitasnya yang cenderung meningkat.

Dikarenakan negara berkembang menduduki posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, maka realitasnya perusahaan-perusahaan hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang mampu melayani kepentingan dari perusahaan-

perusahaan negara barat dan *multi national*. Sedangkan pilihan-pilihan untuk kepentingan nasional relatif lebih banyak. Oleh karena itu pilihan atau langkah yang ditempuh dengan melakukan adopsi kebijakan akuntansi barat daripada mengembangkan kebijakan yang ada.

Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menghindari muncul model sistem akuntansi barat di negara berkembang. Realitas seperti kasus di Indonesia, banyak negara berkembang mengadopsi regulasi akuntansi barat, terutama IAS, dalam rangka untuk mengakses pasar uang global. Sepanjang negara berkembang memerlukan modal dari pasar, maka akan mencoba melakukan sesuatu untuk meningkatkan mutu akuntansi keuangan di negaranya dengan standar barat yang dibutuhkan pasar global. Padahal pemerintah negara berkembang berada dalam kepentingan sosial dan politis domestik mereka sendiri. Reformasi sistem akuntansi dalam negeri namun

dengan menggunakan sistem akuntansi menurut standard barat.

Hasil lain dalam kasus Indonesia menunjukkan bahwa pengenalan standar akuntansi internasional (IAS) nampaknya hanya memiliki sedikit pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan sistem akuntansi dengan model barat, maka negara berkembang tidak hanya sekedar memperkenalkan regulasi akuntansi barat saja namun ternyata diperlukan adanya perubahan politis secara mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Hal ini mengandung makna bahwa dengan melakukan perubahan politis secara mendasar atas struktur ekonomi maka berdampak pada marginalisasi atas kepentingan sosial dan politis dalam negeri suatu negara demi melayani kepentingan perusahaan multinasional.

Irianto (2004) menggunakan telaah dari perspektif *political economy of accounting* (PEA) dalam mengkaji pelaksanaan privatisasi di perusahaan BUMN di Indonesia yaitu PT. Semen

Gresik (Persero) Tbk. Hasil penelitian yang cukup menarik adalah bahwa dalam kasus proses privatisasi di Indonesia ternyata informasi akuntansi telah digunakan baik oleh pihak yang mendukung maupun dengan pihak yang menentang kebijakan privatisasi pada salah satu BUMN di Indonesia. Dalam kasus tersebut ternyata masing-masing pihak menggunakan pendekatan dan “angka-angka akuntansi” yang berbeda-beda dalam rangka memberikan justifikasi atas argumen masing-masing.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan privatisasi BUMN tujuan lain privatisasi sebagaimana dalam master plan reformasi BUMN 1998 yaitu distribusi kepemilikan perusahaan yang mengandung makna perlu adanya distribusi kepemilikan perusahaan kepada masyarakat secara adil dan jujur belum dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dan seksama didalam implementasinya. Hal ini terbukti bahwa dalam proses privatisasi PT. Semen Gresik (Persero)

dalam tiga periode yaitu pada tahun 1991, 1995 dan 1998, ternyata telah terjadi oposisi yang kuat dengan munculnya hegemonik MNCs dari berbagai stakeholders yaitu Lafarge (Prancis), Cemex (Mexico), Heidelberger Group (German), Holcim/Holderbank (Swiss) dan Blue Circle (Inggris). Selanjutnya dalam realitasnya hanya terdapat 7 perusahaan yang menguasai industri semen di tanah air. Dari sejumlah perusahaan tersebut ternyata 3 perusahaan telah mampu menguasai kapasitas terpasang semen di Indonesia hingga mencapai 90 persen lebih. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri semen di Indonesia sangatlah tergantung dari kinerja ketiga perusahaan ini.

Hasil lain penelitian Irianto (2004) menunjukkan bahwa ternyata proses privatisasi BUMN di Indonesia telah gagal mengedepankan peran sentral dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak seperti di Inggris Nation Audit Office (NAO) memiliki peran utama dalam melakukan

evaluasi tentang “*how well and to what extent government departments have met their objectives for individual privatisations*” (Wright and Thomspson, 1994)

Bushmana dan Piotroskib (2006) melakukan riset untuk mengetahui pengaruh institusi hukum dan politik dalam laporan keuangan. Dengan perspektif *Political Economic of Accounting* (PEA) peneliti menemukan hasil riset yang menunjukkan bahwa ternyata sistem legal/judicial, undang-undang pasar modal, ekonomi politik, dan rejim pajak suatu negara mampu menciptakan insentif yang mempengaruhi perilaku para eksekutif perusahaan, investor, regulator dan pelaku pasar lainnya. Selanjutnya sebagaimana insentif membentuk properti dari angka-angka akuntansi yang dilaporkan, melalui sifat saling mempengaruhi secara kompleks dari standard akuntansi, undang-undang, pasar, regulator, dan tekanan politis, serta pertimbangan pelaporan yang dilakukan oleh para manajer.

BAB 5

Nilai-Nilai Tauhid dalam Islam

5.1. Pentingnya Nilai Tauhid

Konsep Tauhid (kesatuan) adalah konsep kesatuan yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (Naqvi,1993). Selanjutnya Muhammad (2002) menyatakan bahwa Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendakNya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial

ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.

Berdasarkan konsep Tauhid inilah maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan aspek yang intergral dan menyeluruh. Atas dasar pandangan ini pulalah maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Konsekuensi dari aksioma ini adalah bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktivitas maupun entitas bisnis tidak akan melakukan, paling tidak tiga hal yaitu *pertama* diskriminatif diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja, karyawan, danlainnya berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, posisi. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena

hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai oleh manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah terhadap dunia, karena hakikatnya kekayaan dunia itu merupakan amanah dari Allah SWT.

Shariah enterprise theory ini merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Disadari bahwa dalam teori ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Dengan kata lain bahwa konsep ini belum bisa dijadikan justifikasi bahwa *enterprise theory* menjadi konsep dasar teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari *indirect participants*. Oleh karena itu Triyuwono (2006) dan Slamet (2001) mengusulkan apa yang dinamakan dengan *Shariate ET*. Menurut konsep ini *stakeholders* pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu *direct participants*

dan *indirect participants*. *Direct stakeholders* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan.

5.2. Konsep Kepemilikan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

Dalam konsep kepemilikan dalam Islam, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah bahwa Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada dalam di dunia. Hanya

Allah saja yang berhak menguasai dan memiliki seluruh isi alam dunia. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam kitab sucinya:

*Kepunyaan Allah lah kerajaan
langit dan bumi, dan Allah
Maha Perkasa atas segala
sesuatu (Ali Imron: 189)*

Berdasarkan ayat diatas bisa dipahami bahwa bahwa Allah SWT sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik Tunggal dan Mutlak, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah pertanggungjawaban untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (QS. Al-Baqarah (2) ayat 254 dan 267).

Manusia hanyalah diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (taklif) untuk menjadi seorang khalifa (agen

pembangunan/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

Adalah hal yang naif jika kepemilikan kekayaan di muka bumi ini hanya dikuasai dan terkonsentrasi pada seseorang atau segelintir orang, untuk kemudian dimanfaatkan dan diproduksi tanpa batas dan dengan motivasi *maximazing profit only*. Begitu pula adalah hal yang naif jika kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya dapat dimiliki secara kolektif dan tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada hanya kepemilikan negara.

Berdasarkan pemahaman diatas maka hal ini sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut baik secara individu maupun kolektif dibatasi, karena memang pada hakikatnya *stakeholders* hanya memiliki hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, tetapi

ditujukan pada manusia yang mempunyai hak-hak atas sumber daya tersebut.

5.3. Konsep Zakat

Konsep zakat dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran:

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka yang tidak dapat (berusaha) dibumi, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta (QS. Al Baqorah (2): 273)

Juga dalam ayat yang lain :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah(9) : 60).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam pandangan konsep zakat distribusi kekayaan (wealth) tidak hanya berlaku pada pihak partisipan yang terkait langsung dalam atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya cakupan akuntansi dalam konsep ini tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait

langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi akuntansi (*enterprises theory*) sebelumnya yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (wealth) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Sesungguhnya manusia diciptakan dimuka bumi ini sebagai *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagian seluruh manusia dan alam. Berdasarkan pemahaman ini maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk bisa berbuat adil baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Dengan demikian konsep ini akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders, stockholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan keterampilan) serta lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting

menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001:268).

5.4. Konsep Keadilan

Konsep keadilan Islam menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis, dan tatanan ini dikenal dengan *sunnatullah*. Sifat keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan keadilan atau keseimbangan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembeda. Dengan demikian

kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Pada struktur ekonomi dan bisnis agar kualitas keadilan dapat mengendalikan semua tindakan manusia maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, *pertama* hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Demikian pula sebaliknya memaksimalkan kesejahteraan “total” dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip keadilan. Eksistensi manusia adalah makhluk *teomorfis* yang harus memenuhi ketentuan keadilan nilai yang sama antara nilai sosial

marginal dan individual dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.

Ketiga, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia memerlukan pertanggungjawaban tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang

dilakukannya. Al Qur'an dalam surat An Nisa (4) ayat 85 menegaskan:

“Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul balasannya.

Sesungguhnya dalam ajaran Islam terdapat beberapa prinsip keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Qordawi (2001: 398 – 400) bahwa terdapat tujuh prinsip keadilan. Prinsip keadilan *pertama* adalah membedakan manusia berdasarkan keahlian dan kerja kerasnya. Artinya bahwa termasuk kezhaliman membedakan antara dua orang yang sama tanpa sebab dan alasan, dan bukan termasuk keadilan pula menyamakan antara dua orang yang berbeda karena nafsu persamaan. Sebagian faktor ini adalah karunia yang tidak ada campur tangan manusia padanya, seperti kecerdasan dan kemampuan fisik. Sedangkan sebagian lain

merupakan sesuatu yang bisa diusahakan seperti kesungguhan dan ketekunan. (QS. Az-Zumar: 9, QS An-nisaa:95). *Kedua*, Pengakuan perbedaan pendapatan, artinya Islam mengakui ketidaksetaraan yang adil sehingga tidak diragukan lagi akan mengakibatkan perbedaan dalam pendapatan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa kelebihan ini bukan berarti tidak memberikan kepada sebagian orang sama sekali, dan memberikan segala sesuatu kepada orang lain. sesungguhnya kelebihan ini merupakan sunnatullah (hukum Allah) pada alam dan syariahnya.

Prinsip *ketiga*, pemerataan kesempatan yang mengandung maksud bahwa semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki belajar, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan. Harus diberikan kesempatan yang sama dalam semua hal tersebut karena merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh, sebagai manusia semata-mata dan bukan

sebagai anak-anak kelas khusus. Prinsip *keempat*, memenuhi hak para pekerja, artinya Islam mengajarkan para pemberi kerja untuk senantiasa memenuhi hak pekerja. Dalam keadilan Islam tidak boleh seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara dia tidak mendapatkan upah dan gajinya secara layak, dikurangi dan bahkan ditunda-tunda (QS. Al-Kahfi:30). Tolok ukur yang harus digunakan bagi para pemberi kerja adalah keadilan Allah SWT. Hal yang harus dilakukan para pemberi kerja adalah memberikan upah standar kepadanya dan menambahkan upahnya seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan pengalamannya. Begitu pula setiap kali terjadi kenaikan harga dan setiap kali tercapai peningkatan keuntungan.

Prinsip *kelima*, takaful (kesetiakawanan sosial yang menyeluruh). Bahwasanya perlu ada jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu di masyarakat. Diantara orang-orang yang mampu bekerja ada orang yang harus

menganggur dan tidak mendapatkan kerja sama sekali atau tidak mendapatkan kerja yang sesuai atau mendapat upah tetapi tidak mencukupi karena banyaknya anggota keluarga atau tingginya harga barang-barang. Betapapun terdapat keterpautan antara manusia dalam pendapatan berdasarkan kemampuan dan kerja mereka, sesungguhnya prinsip keadilan Islam mewajibkan pada masyarakat untuk tidak membiarkan kaum lemah diinjak-injak oleh orang yang kuat di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan berbagai ambisi. Disamping itu Islam mewajibkan pada masyarakat untuk membimbing mereka agar kuat dan mandiri.

Prinsip *keenam*, mendekatkan jurang perbedaan antar manusia. Islam mengakui perbedaan fitri yang logis dalam rizki (pendapatan) antar manusia, karena sebelumnya telah ada perbedaan fitri mereka dalam bakat, kemampuan, keahlian, pekerjaan dan kegiatan. Islam sebagai agama yang mengakui, menghargai dan tidak melawan fitrah telah

mengakui pemilikan individu yang berasal dari usaha yang halal untuk memenuhi fitrah kemanusiaan dan dorongan-dorongan fitrah, dalam mencintai kepemilikan, persaingan dan menabung. Islam tidak menghormati kepemilikan pribadi jika berasal dari usaha yang tidak halal, seperti perampasan, pencurian nyata atau yang terselubung seperti suap, sogokan kepada penguasa dengan berbagai hadiah, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Islam menolak kepemilikan ini meskipun telah lama waktunya. Rentang waktu yang lama tidak bisa membolehkan sesuatu terlarang dan tidak bisa pula membalikkan sesuatu yang haram menjadi halal.

Prinsip *terakhir*, mendekatkan kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin, mengandung maksud bahwa meskipun Islam mengakui terhadap perbedaan alami dalam rizki hal ini tidak berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Tetapi Islam ikut campur dengan undang-

undang dan petuah-petuah moral untuk mendekatkan kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Islam membatasi ambisi kaum kaya dan mengangkat taraf hidup kaum miskin. Dalam ekonomi Islam yang mengakui adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan adalah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan (*tawazun*), mematikan api kecemburuan dan kemarahan sosial dan demi menghindari faktor-faktor permusuhan dan perbenturan antara individu dan kelas-kelas sosial.

5.5. Konsep Pertanggungjawaban

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis aksioma ini dijabarkan menjadi pola perilaku tertentu. Karena manusia

telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

Secara keseluruhan konsep pertanggungjawaban dalam Islam dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah (secara vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Triyuwono, 1997). Konsep pertanggungjawaban ini merupakan pengembangan dari hasil premis akuntansi syariah yang bersifat transedental dan teleologikal (Triyuwono, 2000), dimana *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikan pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil.

Pertanggungjawaban ini sebagaimana dalam konsep Nilai Tambah Islam diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu (1) pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*direct stakeholders*) meliputi pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah dan lainnya. (2) pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*) terdiri dari masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) serta lingkungan alam (pelestarian alam). Berdasarkan konsep value added ini maka pengguna laporan keuangan akan mengetahui kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh stakeholders (khususnya *indirect stakeholder*) akan terlihat pada *balance sheet* (neraca).

5.6. Konsep Distribusi Kekayaan

An Nabhani (2000:52) menyatakan bahwa realitas menunjukkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan setiap individu, bukan kebutuhan manusia secara kolektif. Jadi permasalahan utama ekonomi terletak pada distribusi kekayaan kepada setiap individu (warga negara). Oleh karena itu maka harus dicarikan jalan keluar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan fiskal (QS. 59:7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Karenanya kebijakan keuangan tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lain yang diatur melalui syariah Islam seperti mekanismen kepemilikan, pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan.

Karena itu, kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (*as siyasatu al iqtishadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang

dikemukakan Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/basic needs*) individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuan.

Distribusi kekayaan secara meluas mengandung maksud bahwa Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.

Islam memandang masalah ekonomi tidak berasal dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari

sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah, dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi.

BAB 6

Konstruksi Nilai Tauhid ke dalam Political Economy of Accounting

6.1. Proses Internalisasi Nilai Tauhid Ke dalam Political Economy of Accounting (PEA)

Dipahami bahwa dalam konsep *Political Economy of Accounting* (PEA) masih memiliki nuansa sistem kapitalisme. Hal ini bisa diamati dari konsep keadilan dan distribusi yang tercakup didalamnya masih mengandung nuansa pemarginalan pihak-pihak yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. PEA sementara ini masih bersifat duniawi dan belum memiliki konsep Tauhid (Slamet,2001:265). Oleh karena itu agar supaya lebih luas cakupannya yaitu bisa mengakomodir pihak-pihak tersebut di atas serta juga urusan duniawi juga akhirati maka diperlukan pengembangan dengan memasukkan nilai-nilai syariah.

Dalam memahami fenomena kinerja perusahaan misalnya, PEA masih terperangkap dalam posisi pihak-pihak yang langsung berkepentingan dengan perusahaan. PEA melupakan adanya pihak lain yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai penilaian dan pertimbangan dalam memahami sebuah fenomena. Pemahaman dan penilaian atas fenomena juga lebih banyak didasarkan terhadap hal-hal yang bersifat materi saja, misalnya menilai kinerja dari aspek keuangan saja, menilai keberhasilan dan kontribusi materi yang diterima dan masih banyak lagi yang seluruhnya diarahkan dalam nilai-nilai materi.

Keadilan dalam konsep PEA konvensional hanyalah keadilan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan perusahaan dan selalu diukur dari nilai-nilai materi. Adil jika setiap pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan telah memperoleh hak-haknya dengan layak dan sewajar. Dikatakan telah memenuhi rasa keadilan jika perusahaan telah

memenuhi dan memberikan kenikmatan (hak-hak) materi kepada setiap pihak yang langsung berhubungan dengan perusahaan. PEA telah menafikan keberadaan pihak yang tidak berkontribusi pada perusahaan, menafikan nilai non materi yang melekat dalam diri manusia seperti perasaan, kepuasan batin, kebebasan, kesenangan, kebebasan, ketenangan, kedamaian, ketentraman manusia (masyarakat). Nilai-nilai ini tidak bisa dikesampingkan bahwa selama ini telah menjadi ukuran “sang lain” bagi manusia dalam menilai sebuah kinerja perusahaan. Realitasnya banyak pihak menilai sebuah kinerja perusahaan tidak hanya dalam ukuran materi saja, ukuran non materi bahkan seringkali dijadikan ukuran dalam memahami dan menilai sebuah kinerja.

Konsep PEA menilai distribusi kekayaan dan beban sebatas dari sudut pandang pihak-pihak yang langsung berkontribusi terhadap perusahaan. Kekayaan suatu perusahaan dikatakan telah terdistribusi secara merata jika

telah dibagi secara proposional kepada pihak yang berkontribusi langsung kepada perusahaan misalnya investor dan kreditur. Ukuran distribusi kekayaan yang merata dalam PEA dinilai dari pemerataan pendapatan yang diterima secara proposional oleh para pemilik modal dan pemberi kredit sebagai pihak yang berkontribusi langsung dengan perusahaan. Adapun pihak yang tidak berkontribusi kepada perusahaan misalnya tenaga kerja, masyarakat sekitar, alam atau lingkungan tidak menjadi pertimbangan dalam menilai pemerataan dalam distribusi kekayaan sebuah perusahaan. Dengan kata lain kekayaan perusahaan tidak akan pernah terdistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak langsung tersebut karena mereka tidak memiliki kontribusi kepada perusahaan.

Pada gilirannya diperlukan sebuah pengembangan pendekatan yang mampu memahami fenomena kinerja perusahaan yang tidak memenjara dirinya pada posisi tertentu saja namun dalam posisi semua pihak baik yang

langsung berkepentingan dengan perusahaan maupun pihak yang tidak langsung berkepentingan. Konsep yang mampu menghadirkan pemahaman dan penilaian atas fenomena yang didasarkan tidak hanya bersifat materi namun juga non materi.

Kehadiran *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) pada dasarnya merupakan sebuah keharusan. Suatu konsep pengembangan PEA yang lebih mengakui nilai-nilai dan pihak-pihak lain yang selama ini termarginalkan. PESA merupakan sebuah fenomena baru yang lebih natural dan lebih manusiawi, dan sunnatullah. Sebuah pendekatan yang lebih integral dengan memasukkan nilai-nilai *Tauhidiah* kedalam perspektif analisisnya. Jadi dengan pendekatan *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) ini maka perspektif analisis akan semakin luas dan lebih leluasa dikarenakan tidak hanya dalam perspektif yang bersifat materi namun juga terhadap perspektif yang bersifat non materi. Selain itu perspektif

lebih diperluas dengan cara menghargai keberadaan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan sebagai satu kesatuan sistem pertanggungjawaban.

Konsep dasar PESA pada hakekatnya dikembangkan dengan cara menginternalisasi konsep-konsep Islami yang telah ada berkenaan dengan ekonomi antara lain konsep kepemilikan, konsep zakat, konsep keadilan serta konsep pertanggungjawaban, konsep distribusi kedalam PEA yang telah ada sebelumnya. Konsep-konsep sebagaimana disebut sebelumnya pada dasarnya merupakan dasar terbangunnya *shariah enterprise theory* yang digagas oleh Triyuwono (2006).

6.2. Menggapai Political Economy of Shariah Accounting (PESA)

Konsep-konsep dalam *Shariah Enterprise Theory* pada uraian sebelumnya mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada dalam kekuasaan Allah, sementara

manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardi*). Oleh karena itu manusia harus selalu peduli terhadap seluruh pihak baik partisipan yang terkait langsung dan tidak langsung dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Manusia perlu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat seluruhnya, alam dan lingkungan serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia dan akhirat.

Nilai-nilai luhur dari konsep *shariah enterprise theory* ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan PESA dengan jalan menginternalisasinya. Dengan internalisasi nilai-nilai Tauhid maka *Political Economy of Accounting* (PEA) bisa lebih jauh dikembangkan

sebagai pendekatan yang lebih integral dan tidak melepaskan aspek spiritual di dalamnya. Dengan demikian maka pendekatan PEA kemudian bisa diperluas dengan memasukkan aspek non material dan melibatkan pihak yang tidak langsung serta alamlingkungan sebagaimana dianut dalam filsafat transedental dan filsafat teleologikal dalam teori akuntansi Syariah (Triuwono,2006).

Transedental mengandung maksud bahwa akuntansi syariah tidak hanya mencakup satu disiplin ilmu atau satu aspek materi (ekonomi) saja. Diharapkan bahwa akuntansi bisa melewati sekat-sekat keilmuan yang mengekang dirinya dan merambah keseluruhan penjuruan keilmuan dan bahkan dunia non materi. Dengan demikian maka konsepnya akan lebih lengkap dan semakin integral dalam mengakomodir seluruh pemikiran dalam ilmu-ilmu diluar akuntansi khususnya dan masalah non materi pada umumnya. Adapun *Teleologikal* dimaknai bahwa akuntansi tidak hanya sekedar

menjadi alat untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan ekonomi yang strategis namun demikian juga memiliki makna yang lebih luas yaitu merupakan wujud dari rasa tanggungjawab manusia terhadap Tuhan, kepada manusia lain, termasuk pula kepada alam semesta (Triuwono; 2006).

Sementara ini dalam konsep PEA untuk memahami sebuah fenomena (kinerja) juga bisa dilihat dari beberapa perspektif yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Namun demikian dalam operasionalnya masih diarahkan pada kepentingan pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (memberikan kontribusi langsung pada bisnis perusahaan), misalnya bagaimana distribusi kekayaan terhadap investor, kreditor dan karyawan dilakukan. Sedangkan kepentingan pihak yang tidak memberikan kontribusi langsung sementara ini diabaikan, semisal masyarakat sekitar perusahaan, lingkungan alam dan lain sebagainya. Padahal keberadaan pihak-pihak

yang tidak langsung ini juga sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh operasional perusahaan.

Selain itu PEA dalam memandang kinerja suatu institusi masih sebatas menggunakan ukuran materi saja misalnya dari ukuran keuangan, distribusi produk, efisiensi produk, pelayanan produk, jumlah pelanggan, kinerja karyawan dan lain-lain yang keseluruhannya identik dengan materi. Sedangkan ukuran kinerja yang bersifat non materi belum diungkap sebagai bagian dari penilaian kinerja suatu perusahaan. Beberapa contoh ukuran kinerja non materi misalnya *pertama*, tingkat kepedulian sosial perusahaan baik bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lainnya sebagai konsekuensi keberadaan perusahaan di tengah-tengah komunitas. *Kedua*, kinerja lingkungan (ekologi) sebagai ukuran tingkat kepedulian perusahaan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan (analisis dampak lingkungan) yang ditimbulkan dari operasional perusahaan. Ukuran kinerja non

materi sebagaimana disebut diatas merupakan sudut pandang kinerja yang sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan namun demikian belum sepenuhnya diungkapkan sebagai bagian dari kinerja perusahaan. Seandainya ukuran kinerja non materi ini dipadukan sebagai bagian yang utuh dari kinerja perusahaan maka akan semakin utuhlah pemahaman masyarakat terhadap kinerja yang riil dari sebuah perusahaan.

Disadari bahwa dalam konsep syariah hakekat kepemilikan berada dalam naungan Allah sedangkan manusia itu sebagai pemegang amanah (*khalifa*) dariNya. Sebagai khalifa di bumi tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban selama ini. Pertanggungjawaban atas hubungannya dengan manusia (semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi), dengan lingkungan sekitar, alam dan pertanggungjawaban kepada Allah secara vertikal. Maka dengan demikian pengembangan

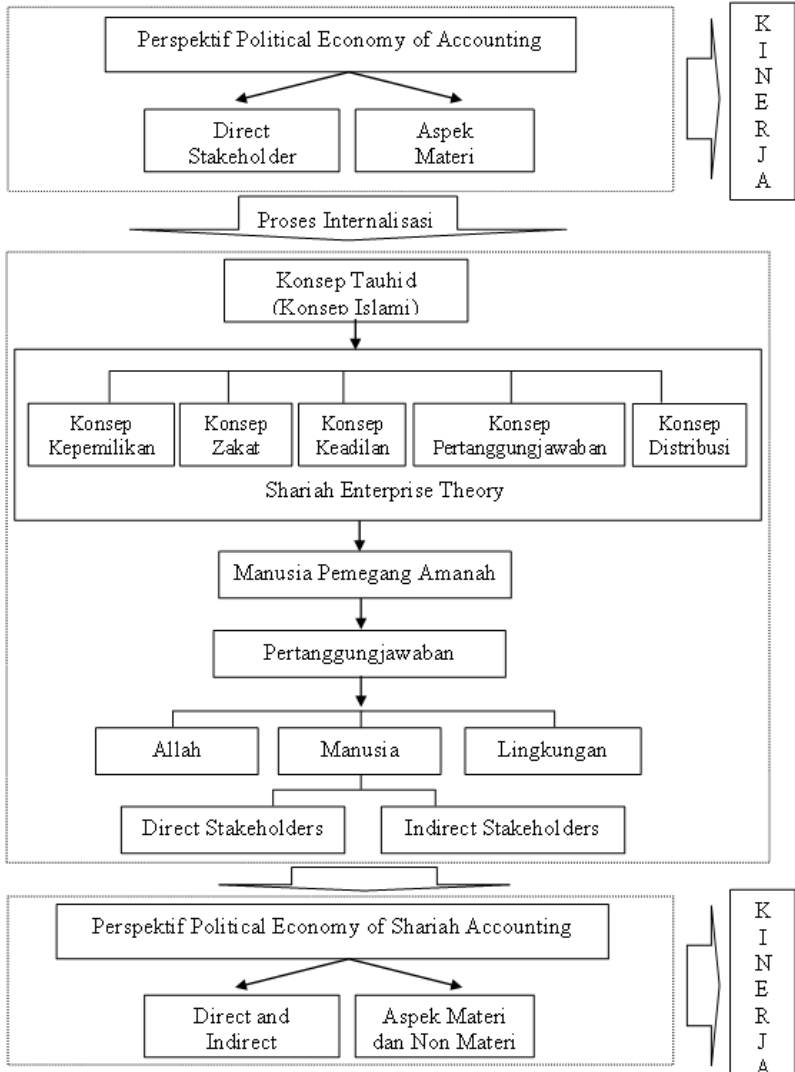
analisis PEA menjadi PESA dilakukan dengan mengarahkan perspektif analisis terhadap seluruh pihak untuk memadukan kepentingan pihak yang terkait maupun dengan pihak yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan, termasuk didalamnya adalah aspek lingkungan.

Dari aspek lingkungan misalnya akan bertujuan memahami kinerja perusahaan dilihat dari sudut pandang kelestarian alam atau lingkungan hidup tempat dimana perusahaan berada dan tempat dimana bahan baku perusahaan diperoleh. Dari aspek ini dilihat secara komprehensif bagaimana keterkaitan antara kinerja dengan perkembangan lingkungan alam sekitar. Apakah kinerja ekonomi meningkat berarti juga meningkatkan upaya pelestarian alam lingkungan sekitar perusahaan dan tempat bahan baku, ataukah malah sebaliknya semakin rusak lingkungan alam tersebut.

Selain itu dalam konsep PESA dalam memahami kinerja perusahaan dilihat tidak

hanya dari ukuran atau indikator yang bersifat materi namun juga indikator yang bersifat non materi. Dengan demikian diharapkan kehadiran PESA dipihak lain akan mengakomodasi pihak-pihak yang sementara ini termarginalkan akibat sistem kapitalisme yang cenderung memisahkan nilai-nilai ruhaniah dari aktivitas ekonomi dan bisnis, juga akan memasukkan nilai non materi sebagai sudut pandang pemahaman sebuah kinerja perusahaan.

Selanjutnya harapan dari pendekatan PESA adalah bahwa dengan memahami kinerja perusahaan yang melibatkan perspektif politik dalam kerangka ekonomi politik maka akan dihasilkan sebuah analisis yang lebih komprehensif dan lebih tepat, dikarenakan setting politik yang ada pada saat menghasilkan kinerja turut pula diketahui sebagai dasar dalam menyusun kinerja tersebut.



Gambar 6.1
Konstruksi PEA Menuju PESA

6.3. Karakteristik Political Economy of Shariah Accounting

Political Economy of Shariah Accounting (PESA) sebagai pengembangan lebih lanjut dari *Shariah Enterprise Theory* memiliki karakteristik unik dan unggul. Setidaknya terdapat enam karakteristik yang membedakannya dengan *Political Economy Accounting* (PEA). Keenam karakteristik yang menjadi ciri dari PESA tersebut secara ringkas disajikan dalam Tabel 6.1.

Karakteristik pertama berkenaan dengan landasan sistem ekonomi yang mendasari terbangunnya PESA. PESA terbangun dengan dilandasi sistem perekonomian Islam (Syariah) sedangkan PEA didasari dengan sistem perekonomian kapitalis. PESA hadir dengan berorientasi pada penerapan sistem ekonomi Islam tentunya berupaya menyempurnakan konsep kapitalisme yang syarat dengan nilai-nilai materialis, individualis, egoistis dan *profit oriented* sebagaimana dianut dalam PEA. Dengan menggunakan orientasi ekonomi syariah

maka segenap operasionalisasi perusahaan lebih ditujukan kepada arah kemaslahatan umat manusia, dan alam semesta. Ekonomi syariah membongkar nilai-nilai kapitalisme dan merubahnya menjadi nilai-nilai yang lebih humanis, emansipatoris, transedental serta teologikal.

Tabel 6.1.
Karakteristik PEA dan PESA

Keterangan	PEA	PESA
Landasan Ekonomi (Akuntansi)	<ul style="list-style-type: none">▪ Ekonomi Kapitalisme	<ul style="list-style-type: none">▪ Ekonomi Islam (Syariah)
Perspektif	<ul style="list-style-type: none">▪ Multiperspektif; tidak termasuk perspektif spiritual	<ul style="list-style-type: none">▪ Multiperspektif, termasuk perspektif spiritual
Distribusi Kekayaan (Nilai Tambah)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pihak terkait langsung dengan operasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pihak terkait langsung dengan operasi perusahaan▪ Pihak tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan.
Prinsip Kontribusi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan

	skill pada perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihak yang tidak langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan
Nilai Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadilan bagi manusia, terutama manusia yang terkait langsung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadilan bagi manusia, langsung maupun tidak terkait langsung ▪ Keadilan bagi lingkungan alam ▪ Keadilan bagi Al Khalik
Prinsip Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horisontal: Manusia Terkait Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikal : Allah ▪ Horisontal : Umat Manusia Alam

Perspektif PESA yang multi perspektif dan diinternalisasi dengan nilai-nilai Tauhid menjadi karakteristik kedua yang membedakan dengan PEA. Sesungguhnya PEA juga memiliki perspektif yang luas dalam memahami sebuah fenomena sebagaimana PESA, namun demikian masih terdapat perspektif yang belum tercakup yaitu perspektif yang memiliki nilai-nilai Tauhid. Perspektif yang dimaksud dalam nilai-nilai Tauhid antara lain perspektif dari pihak yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan, dan juga dari perspektif lingkungan alam. Fenomena

kinerja akuntansi misalnya tidak cukup hanya dilihat dari perspektif ekonomi dan non ekonomi pada sudut pandang pihak yang terkait langsung dengan operasional perusahaan, namun realitasnya hal itu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan. Terlebih lagi memahami kinerja usaha dengan tidak memasukkan sudut pandang lingkungan alam dimana sumber daya usaha diperoleh oleh perusahaan menjadi semakin “hambar” nilai pemahaman tersebut.

Karakteristik ketiga adalah dalam memahami distribusi kekayaan (*wealth*). PEA masih mendasarkan pada premis bahwa untuk mendistribusikan kekayaan didasarkan pada pihak yang terkait langsung dengan operasi perusahaan saja sedangkan pihak yang tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan tidak menjadi sasaran distribusi kekayaan. Adapun PESA tidak memisahkan antara pihak-pihak terkait dan tidak terkait sebagai target

dalam mendistribusikan kekayaan. Seluruh pihak diasumsikan memberikan pengaruh terhadap usaha perusahaan, dan oleh karena itu maka seluruh pihak tersebut memiliki hak yang sama dalam memperoleh distribusi kekayaan.

Pihak yang langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan dan yang tidak langsung memberi kontribusi keuangan dan skill pada perusahaan menjadi karakteristik keempat. PEA memandang bahwa pihak yang berkontribusi pada perusahaan adalah pihak yang memberikan kontribusi berupa dana atau keuangan serta keahlian yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan pihak yang tidak memberikan dana dan keahlian pada perusahaan dianggap bukan pihak yang berkontribusi dan oleh karena itu tidak harus mendapatkan perhatian perusahaan. Konsep PESA dalam menilai pihak yang berkontribusi pada perusahaan tidak mendikotomi antara pihak yang memberi atau tidak memberi baik *skill* maupun dana bagi perusahaan. Dengan kata lain

seluruh pihak menurut konsep ini perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan.

Karakteristik kelima yang membedakan PESA dari PEA adalah bahwa keadilan dalam PESA tidak semata-mata hanya keadilan bagi manusia yang secara langsung terkait dengan usaha perusahaan sebagaimana menjadi konsep utama PEA. PESA menghadirkan nilai keadilan juga bagi manusia yang tidak terkait langsung dengan usaha perusahaan, keadilan bagi lingkungan alam semesta dan juga keadilan bagi Sang Penguasa alam semesta.

Terakhir karakteristik prinsip pertanggungjawaban perusahaan, dimana PEA yang didasari dengan konsep *enterprises theory* yang lebih berorientasi profit dan oleh karenanya maka tanggungjawab perusahaan sepenuhnya hanya diarahkan bagi kepentingan pemilik modal (*stockholders*) semata, dan tentunya mengabaikan keberadaan pihak lain yang tidak memiliki kontribusi pada perusahaan untuk dijadikan sebagai bagian dari

pertanggungjawaban perusahaan. Sebaliknya PESA yang dibangun dari *shariah enterprises theory* tidak hanya berorientasi pada profit semata dan memiliki semangat mempertanggungjawabkan amanah yang telah diterima kepada Sang Pemberi Amanah dengan wujud segenap kegiatan usaha perusahaan diarahkan untuk kemaslahatan umat dan alam semesta secara jujur dan berkeadilan.

BAB 7

Aplikasi *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) dalam Menilai Pendapatan

Aplikasi PESA dalam pendapatan mengandung arti pemberian analisis atas nilai, makna, dan kepentingan yang tersembunyi dibalik angka kinerja pendapatan yang telah dihasilkan perusahaan dalam perspektif *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA). Tiga prinsip utama PESA berupa *Ketauhidan, Al-adalah dan Al-malaka* akan dijadikan sarana untuk memotret fenomena dibalik kenaikan pendapatan.

7.1. Pendapatan Dalam Bingkai Materi

Dalam perspektif ekonomi neoklasik, pendapatan merupakan salah satu indikator dari kinerja yang dihasilkan perusahaan. Pendapatan memiliki porsi penting karena merupakan sumber utama pendanaan perusahaan selama proses operasi perusahaan. Angka pendapatan

yang disajikan dalam laporan keuangan akan mampu menggambarkan kondisi perusahaan baik di masa lalu dan di masa yang akan datang. Pendapatan yang cenderung tinggi menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki kemampuan penjualan yang baik. Sebaliknya angka pendapatan yang cenderung rendah menjadi indikasi buruknya kinerja perusahaan.

Berikut contoh pendapatan dari perusahaan yang memiliki kinerja pendapatan yang sangat baik. Hasil kinerja pendapatan perusahaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mulai tahun 2012 hingga tahun 2021 dipaparkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Perkembangan Pendapatan
Tahun 2012 – 2021

Tahun	Pendapatan	Kenaikan	% Kenaikan
2012	1,226,700,392.00	66,220,894.00	0.06
2013	1,742,645,411.00	515,945,019.00	0.42
2014	2,119,845,545.00	377,200,134.00	0.22
2015	3,436,863,735.00	1,317,018,190.00	0.62
2016	3,805,063,475.00	368,199,740.00	0.11

Tahun	Pendapatan	Kenaikan	% Kenaikan
2017	4,504,962,245.00	699,898,770.00	0.18
2018	5,322,619,310.00	817,657,065.00	0.18
2019	5,831,682,805.00	509,063,495.00	0.10
2020	6,358,038,335.00	526,355,530.00	0.09
2021	7,189,018,660.00	830,980,325.00	0.13
Rata-rata pendapatan		409.107.442,63	0.16

Sumber: Data laporan keuangan audited 2012 - 2021

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan selama beberapa tahun tersebut cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari *trend* kenaikan pendapatan yang selalu naik setiap tahun. Rata-rata kenaikan pendapatan perusahaan selama enam belas tahun bisa mencapai Rp 409.107.442,63 pertahun atau setara dengan kenaikan pendapatan 16% pertahun.

7.2. Penilaian Kenaikan Pendapatan dalam Bingkai PESA

Dalam perspektif keuangan, *trend* kenaikan pendapatan perusahaan menunjukkan

hasil yang baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pemahaman kinerja pendapatan dari perspektif ini hanya sebatas pada kecenderungan angka-angka pendapatan dari waktu-ke waktu. Untuk mendapatkan pemahaman secara lebih jauh tentang makna-makna, nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di balik angka kinerja pendapatan tersebut, tidak bisa dilihat dari perspektif ini. PESA diperlukan untuk dapat mengungkap makna, nilai dan kepentingan tersebut.

7.2.1. Mendongkrak Pendapatan, Naikkan Tarif Saja.

Dalam perspektif PESA, menilai kinerja tidak dibatasi dari kecenderungan angka-angka pendapatan yang diraih perusahaan. Perkembangan kenaikan pendapatan yang positif bagi perusahaan belum cukup untuk menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Diperlukan pemahaman makna, nilai, dan

kepentingan yang ada di balik perkembangan kenaikan pendapatan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan informan perusahaan, diketahui bahwa kenaikan pendapatan perusahaan lebih banyak dipengaruhi faktor kenaikan tarif daripada faktor kenaikan kuantitas penjualan. Hal ini berarti bahwa kenaikan pendapatan tidak didukung dengan kenaikan penjualan. Kenaikan pendapatan cenderung diakibatkan karena peran tarif baru yang diberlakukan oleh perusahaan. Kenaikan tarif yang ditetapkan perusahaan secara rutin, berperan besar dalam meningkatkan pendapatan. Selama ini perusahaan menerapkan kebijakan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali dan tentu memiliki dampak luar biasa terhadap perkembangan penjualan dalam rupiah.

Hal ini bisa dilihat bahwa pada tahun-tahun tarif dinaikkan, kecenderungan yang terjadi adalah penjualan mengalami peningkatan

signifikan dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada saat tarif masih menggunakan harga lama sebelum ada kenaikan. Dengan demikian dipastikan bahwa memang kinerja pendapatan perusahaan dipengaruhi oleh strategi peningkatan tarif secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara, hampir semua manajemen sepakat mengatakan bahwa tidak ada strategi lain yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan selain dari tarif. Kenaikan tarif bagi perusahaan seakan menjadi strategi *absolut* dan satu-satunya cara ampuh untuk meningkatkan pendapatan. Selama sepuluh tahun terakhir strategi ini tetap menjadi pilihan utama dan idola bagi manajemen. Struktur organisasi manajemen bertahun-tahun boleh berubah, tetapi strategi kenaikan tidak pernah berubah, “*sekali tarif tetap tarif*”.

Kenaikan tarif sebagai “senjata utama” dan dilakukan secara berturut-turut memungkinkan bagi perusahaan. Bentuk perusahaan yang monopoli sangat mendukung, dan ada jaminan bahwa pelanggan tidak akan beralih ke perusahaan lain. Perusahaan bisa dengan leluasa menentukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kinerja mereka.

Menjadikan kenaikan tarif sebagai strategi peningkatan pendapatan sebenarnya sah-sah saja. Namun demikian, jika strategi ini berulang-ulang dilakukan tanpa diimbangi dengan peningkatan kuantitas penjualan maka akan menjadi indikator bahwa perusahaan miskin strategi. Artinya perusahaan tidak memiliki banyak inovasi produk atau strategi lain yang lebih baik dan arif dalam upaya meningkatkan pendapatan. Menjadikan strategi ini sebagai satu-satunya alat sungguh sangat naïf, perlu dipertanyakan kualitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Karena strategi ini adalah pilihan

paling mudah dan murah tanpa perlu sumber daya manusia yang cerdas, pintar dan berpendidikan. Tentu strategi ini sangat cocok dalam kondisi pasar monopoli, dimana tidak perlu mempertimbangkan pesaing yang menghasilkan produk sejenis.

Dalam kondisi pasar persaingan bebas, strategi ini adalah pilihan paling akhir karena efek negatif terhadap konsumen sangat besar. Strategi ini adalah alat konvensional, tidak inovatif, tidak *smart* dan paling berisiko terhadap hilangnya pelanggan. Strategi ini rentan dan sensitive bagi pelanggan, perlu secara cermat mempelajari hilangnya konsumen akibat kenaikan harga. Meningkatkan pendapatan tidak hanya dari menaikkan harga tapi bisa sebaliknya, dengan menurunkan harga untuk mengejar kuantitas penjualan. Atau dengan harga tetap promosi ditingkatkan untuk mengejar omset penjualan (Bradbury, 2007:4).

7.2.2. Penetapan Tarif: Mengorbankan Kejujuran dan Keterbukaan

Strategi kenaikan tarif yang dimainkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan idealnya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang ditentukan dalam peraturan pemerintah (Permendagri). Transparansi mengandung maksud bahwa dalam proses penetapan tarif semua dasar dan alasan-alasan yang logis diungkapkan kepada publik. Akuntabilitas mengandung makna bahwa penetapan yang melalui proses transparansi ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Permendagri nomor 23/2006).

Senada dengan aturan pemerintah, Islam juga telah memberikan rambu-rambu dalam penetapan tarif, yaitu nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid mengandung konsekuensi bahwa dalam berusaha harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan.

Dengan demikian idealnya dalam proses penetapan tarif melakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi. Jangan sampai tujuan utama meningkatkan pendapatan perusahaan mengalahkan prinsip-prinsip yang telah dibangun (Choudhury, 2006: 4).

Namun demikian, karena perusahaan merupakan perusahaan monopoli, dan posisinya sebagai *price setter* maka kondisi ideal itu sulit untuk dilakukan. Realitasnya, penentuan tarif atau harga air minum sepenuhnya menjadi kekuasaan perusahaan, dan pihak konsumen tidak memiliki alternatif produk. Sifat monopoli dapat membuat perusahaan berlaku semena-mena dalam menentukan tarif. Prinsip transparansi dan kejujuran sudah tidak lagi dipertimbangkan, yang utama adalah pendapatan naik. Realitas di atas sepenuhnya terjadi di perusahaan, sebagaimana dinyatakan Manajer Keuangan dan Umum:

Selama ini tidak ada mekanisme musyawarah dengan pihak

konsumen, walaupun ada dengan perwakilan rakyat (DPRD) itu hanya musyawarah untuk memenuhi syarat administrasi saja. Pada kenyataannya DPRD hanya sebagai tempat “ngobrol” dan pada akhirnya semua terpulung kepada pihak perusahaan.

“Kami sudah lima kali menaikkan tarif sejak tahun 1998 sampai tahun 2008. Kenaikan tarif kami lakukan setiap dua tahun sekali. Selama itu pula memang banyak pertentangan dari konsumen, namun kami selalu bisa mengatasi masalah itu bersama dengan anggota DPRD. Kami sudah terbiasa rembuk-rembuk masalah tarif dengan DPRD.”
(Wawancara 20 Juli 2021)

Penetapan tarif perusahaan tidak memperhatikan keadilan bagi pelanggan. Hal ini bisa dilihat dari realitas dimana dengan tarif yang lama aliran air ke rumah penduduk bisa dibilang

sangat seret. Air mengalir lebih banyak mati dan bahkan terkadang satu hari tidak ada air yang masuk ke rumah pelanggan. Namun demikian tagihan air setiap bulannya selalu sama karena memang selama ini pembacaan meter air pelanggan tidak dilakukan secara jujur dan berkeadilan. Inilah bentuk kegelisahan dan keluhan pelanggan yang selama ini tidak pernah diperhatikan terutama dalam mempertimbangkan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali. Tarif telah diputuskan perusahaan, pelanggan mau tidak mau harus menerima perlakuan ini. Simak pernyataan Ibu Ningsih sebagai pelanggan berikut ini:

“Sebagai pelanggan yang jelas saya tentu sangat membutuhkan air, tapi kalau terus-terusan dinaikkan seperti ini saya serba repot. Mau menolak tidak punya air bersih mau terima beban kehidupan saya makin berat. Kadang saya bertanya-tanya apa memang pelanggan air itu benar-benar

tidak berdaya atas kenaikan air perusahaan. Selama ini saya merasa tidak pernah diajak bicara tentang kenaikan tarif, dan saya juga tidak tahu bahwa ada prinsip keterjaukauan” (Wawancara 28 Juli 2021)

Bagaimanapun peran dan posisi pelanggan bagi perusahaan sangat besar maknanya. Oleh karena itu keberadaan pelanggan patut juga dipertimbangkan dalam penetapan tarif bagi perusahaan. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 bahkan menegaskan peran penting pelanggan bagi perusahaan dalam menetapkan tarif. Dalam Permendagri tersebut dinyatakan sebuah prinsip penetapan tarif air minum yaitu harus ada proses konsultasi dengan perwakilan pelanggan untuk menyepakati tarif yang diterima kedua belah pihak.

Pelanggan belum sepenuhnya dilibatkan dan diberdayakan dalam proses penetapan tarif

oleh perusahaan dapat dilihat dari banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan atas pemberlakuan tarif. Justru yang menarik adalah bahwa keluhan-keluhan pelanggan di peroleh dari hasil sidak dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misalnya sidak yang dilakukan bapak Khoirul Kalam seorang anggota legislatif komisi B yang menyatakan bahwa Tarif perusahaan jika dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Jawa Timur pulau berada di rating tertinggi alias paling mahal (Wawancara, 29 Juni 2021). Kemudian ketua komisi B Bapak Ismail A. Rahim yang telah melakukan upaya sidak langsung kepada para pelanggan di beberapa daerah jaringan PERUSAHAAN, Temuannya menyatakan bahwa puluhan kepala keluarga (KK) mengeluhkan penerapan tarif air perusahaan yang diberlakukan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Idealnya sebagaimana

dalam konsep Islam pemerintah harus mampu mengendalikan tarif atau harga agar supaya pihak pelanggan tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam masalah perdagangan, Islam telah memperhatikan masalah mekanisme penentuan harga yang berkeadilan dan transparan. Islam menentang penentuan harga secara sepihak oleh produsen sebagaimana di dalam pasar monopoli yang cenderung berpotensi merugikan konsumen di satu pihak dan menguntungkan produsen di pihak lain. Harga yang dihasilkan dalam sistem monopoli ini lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja.

7.2.3. Mengejar Pendapatan, Tak Peduli Pelayanan Pelanggan.

Meningkatnya pendapatan perusahaan dalam perspektif PESA tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar dan seberapa lama peningkatan pendapatan itu dihasilkan oleh perusahaan. Lebih dari sekedar itu, PESA

memahami peningkatan pendapatan pada sejauh mana keadilan yang menjadi cita-cita ditetapkannya hukum-hukum Islam atas pengelolaan ekonomi umat (Efrinaldi: 2009). Keadilan yang dimaksud adalah terciptanya iklim usaha yang memiliki manfaat positif, berkeadilan dan distribusi yang merata bagi seluruh pihak. Tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang langsung berkontribusi kepada perusahaan namun juga pihak lain yang tidak langsung berkontribusi, termasuk pula keadilan bagi alam sekitar.

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik

maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.

Islam dalam segala hal senantiasa mengajarkan konsep keseimbangan yang berkeadilan. Keadilan bagi pihak yang lemah pun demikian keadilan bagi pihak yang kuat. Sebagaimana teori keadilan Rawls (1973) menyebutkan bahwa praktek-praktek bisnis seharusnya menjalankan prinsip-prinsip keadilan yaitu tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak. Hal ini mensyaratkan kepada perusahaan dan seluruh pihak-pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung untuk tetap mempertahankan azas keadilan bagi seluruhnya tanpa memihak.

Meningkatnya pendapatan perusahaan setiap tahun bagi pelanggan bukanlah suatu kejutan. Pendapatan perusahaan logikanya akan naik terus sebagai konsekuensi dari peningkatan tarif yang dilakukan secara rutin. Namun demikian, bagi pelanggan yang terpenting adalah apakah kenaikan pendapatan perusahaan telah memperhatikan aspek keadilan pelayanan bagi pelanggan atau malah sebaliknya?

Fakta tentang penegakan keadilan dalam perusahaan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan perusahaan setiap tahun justru cenderung membebani para pelanggan dan tidak diimbangi dengan komitmen tinggi meningkatkan pelayanan. Masih dijumpai beberapa kasus dimana perusahaan mengabaikan pelayanan dan kepentingan pelanggan, keluhan pelanggan sering tidak ditanggapi dengan baik oleh perusahaan. Semua ini menandakan bahwa memang kedudukan antara konsumen dan produsen tidak

setara. Dengan kata lain kinerja pendapatan perusahaan hanya ditujukan pada kepentingan perusahaan semata, sedangkan *stakeholders* lain (utamanya pelanggan) kurang mendapatkan perhatian (Chwastiak dan Young, 2003).

Simak pernyataan bapak Saiful seorang pelanggan atas tanggapan mereka terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.

“Perusahaan mendapat penghasilan tinggi namun kita para pelanggan setiap bulan harus membayar rekening air secara rutin dalam jumlah yang relatif besar dan cenderung tetap, namun demikian debit air yang dia terima tidak kunjung menunjukkan perbaikan yang serius dari pihak perusahaan. Setiap hari dari petang hingga pagi terkadang air di rumah kami tak keluar setetespun. Bayangkan, disedot dengan pompa cuma angin yang mendesis, kami beberapa warga juga terpaksa rame-rame bikin tandon air dengan menggali tanah

untuk menampung tetesan air yang tidak tentu mengalirnya. Sungguh melelahkan dan memberatkan kami sebagai pelanggan, biaya pompa jelas harus kami keluarkan belum juga biaya menggali tandonnya.” (Wawancara 8 April 2021)

Disudut kota lainnya seorang informan bernama Aris memberikan pendapat lain atas kualitas pelayanan perusahaan. Pelanggan senantiasa berada dalam posisi tawar yang sangat lemah karena sebagai pihak yang sangat membutuhkan produk dari perusahaan tersebut.

“Saya sempat memarahi petugas pencatat rekening air perusahaan. Bagaimana tidak, tetangga saya memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak dari pada jumlah anggota keluarga saya dan pemakaian yang relatif sama. Namun yang terjadi justru pembayaran rekening air saya lebih tinggi dari rekening air

tetangga. Harusnya hitungan dari jumlah anggota keluarga biaya pemakaiannya lebih banyak.

Saat ketemu petugas catat saya sedikit mengancam si petugas pencatat meter air dengan berbagai macam dalih, dan ternyata ancaman saya cukup ampuh hasilnya. Pada bulan berikutnya jumlah tagihan rekening saya jauh lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Rupanya petugas pencatat meter air selama ini menurut bapak ini mencatat meteran setiap rumah menggunakan “ilmu hisab” yaitu ilmu kira-kira untuk lebih mempercepat tugas mencatat meter air setiap pelanggan dan kemudian dibuat perkiraan setiap bulan jumlahnya sama.” (Wawancara 8 April 2021)

Fakta lain bahwa sebenarnya peningkatan pendapatan perusahaan justru membuat pelanggan terbebani justru didukung oleh pihak legislatif (Ketua komisi B) Bapak

Ismail A. Rahim yang telah melakukan upaya sidak langsung kepada para pelanggan di beberapa daerah jaringan perusahaan.

“Pelanggan mengeluhkan aliran air bersih ke rumahnya. "Air ke rumah mereka baru bisa keluar saat jam 10 malam hingga pagi. Selebihnya, tidak ada air yang mengalir lagi. Tapi kalau pembayarannya, tetap membayar Rp 62 ribu perbulan, padahal meteran air sudah lama tidak berfungsi.”

“Puluhan Kepala Keluarga (KK) mengeluhkan penerapan tarif air yang diberlakukan. Pasalnya, pelayanan tidak berbanding lurus dengan tarif yang selama ini diberlakukan. Selama 2 bulan, puluhan KK membayar tarif air bersih tanpa adanya air yang mengalir ke tiap rumah mereka. Pelanggan tetap membayar penuh meskipun aliran air ke rumahnya sangat sedikit. Bahkan air terkadang ngadat. Kadang satu hari tidak ada air yang masuk ke rumah pelanggan.

Hasil sidak ditempat lain oleh anggota DPRD menunjukkan bahwa pendapatan sepanjang tahun memang meningkat namun pelanggan tetap melarat. Beberapa hasil investigasi DPRD langsung ke pelanggan sebagaimana diuraikan oleh Ketua komisi B DPRD Bapak Ismail A. Rahim berikut:

“Hasil sidak pertama di salah satu kecamatan oleh Komisi B DPRD Pamekasan bertujuan untuk mengetahui apakah pemberlakuan tarif yang dinilai terlalu tinggi menjadi keluhan masyarakat. Selama ini masyarakat pelanggan mengeluh, seorang pelanggan sebelum adanya kenaikan tarif, mereka ada yang membayar Rp 40 ribu. Namun, saat ini mereka harus mengeluarkan Rp 98 ribu dan itu telah berlangsung selama 4 bulan.”

“Puluhan Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Perumnas Tlanakan mengeluhkan penerapan tarif air PERUSAHAAN yang

diberlakukan. Pasalnya, pelayanan PERUSAHAAN tidak berbanding lurus dengan tarif yang selama ini diberlakukan. Selama 2 bulan, pulau KK membayar tarif air bersih tanpa adanya air yang mengalir ke tiap rumah mereka. Pelanggan tetap membayar penuh meskipun aliran air ke rumahnya sangat sedikit. Bahkan air perusahaan terkadang ngadat. "Kadang satu hari tidak ada air yang masuk ke rumah pelanggan. "Sejumlah pelanggan tetap mengeluhkan pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan jumlah pemakaian serta pelayanan yang diberikan perusahaan ke pelanggan (Radar Madura, 30 Juni 2021)".

Dari beberapa fakta diatas menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan sebagai dampak kenaikan tarif memiliki dampak positif bagi perusahaan. Namun kenaikan itu belum dapat diimbangi dengan penegakan keadilan bagi pihak pelanggan. Pelanggan merasakan ketidakadilan dalam pelayanan sebagai

konsekuensi kenaikan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh pelanggan ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan atas pelayanan perusahaan pasca kenaikan tarif. Dengan kata lain kemaslahatan bagi pelanggan belum dapat dipenuhi oleh manajemen.

Fakta tentang penegakan keadilan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan perusahaan setiap tahun cenderung membebani para pelanggan dan tidak diimbangi dengan komitmen tinggi meningkatkan pelayanan. Kinerja pendapatan (keuangan) perusahaan yang meningkat hanya ditujukan untuk kepentingan perusahaan semata, sedangkan *stakeholders* lain (utamanya pelanggan) kurang mendapatkan perhatian (Chwastiak dan Young, 2003).

Kondisi ideal adalah kenaikan pendapatan akibat tarif harus diikuti peningkatan pelayanan. Artinya bahwa ketika tarif dinaikkan maka pelayanan juga harus diimbangi.

Prinsipnya, tarif harus menguntungkan kedua belah pihak. Pelanggan harus dibela, perusahaan pun harus dibela. Membela perusahaan pun sebetulnya membela kepentingan rakyat. Kalau perusahaan tak mampu lagi beroperasi, yang rugi tentu pelanggan juga. Tidak ada air berarti tidak bisa mencuci, tidak mandi dan tidak ada aktivitas kebersihan.

7.2.4. Pendapatan Meningkat, Lingkungan Terabaikan

Setiap perusahaan tidak dilarang untuk berusaha sekuat tenaga dalam meningkatkan pendapatan. Tentu usaha-usaha ini dibenarkan secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain keberadaan perusahaan akan dapat memberikan kemanfaatan (*kemaslahatan*) bagi *stakeholders*. Kemaslahatan bisa diwujudkan dalam bentuk memberikan kesejahteraan dan keadilan tidak hanya bagi

manusia namun juga berlaku bagi alam sekitar (Triyuwono, 2006:189). Selain pihak yang langsung berhubungan dengan bisnis perusahaan, juga pihak yang tidak berhubungan langsung misalnya lingkungan alam sekitar.

Sebagai perusahaan yang mengolah sumber daya alam, tentu setiap saat bersentuhan dengan alam dan lingkungan. Untuk itu, disamping bisa mengelola sumber daya air sebagai bahan baku, perusahaan juga harus bisa mengelola polusi atau kerusakan yang timbul dari proses produksi (penyedotan) sumber air. Termasuk pula kerusakan yang ditimbulkan akibat penggalian sambungan pipa air bersih yang tertanam di bawah tanah dan jalan-jalan. Sebagai konsekuensi pekerjaan, pada saat pembongkaran dan perawatan harus memperhatikan dan menghindari dampak negatifnya. Perusahaan tidak bisa serta merta meninggalkan dampak-dampak yang ditimbulkan dan hanya fokus pada upaya peningkatan pendapatan semata.

Sehubungan dengan masalah ini, nampaknya perusahaan masih mengalami beberapa kendala. Banyak keluhan masyarakat atas kerusakan jalan-jalan perkotaan di Kabupaten BTM sebagai akibat pekerjaan saluran air. Jalan rusak dibiarkan setelah digali, air mengalir dan menggenang karena bocor, lubang-lubang penggalian tidak ditutup kembali, adalah beberapa contoh dampak yang belum mendapat perhatian serius perusahaan.

Kelalaian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan ini sebenarnya hanya masalah kurang koordinasi perusahaan dengan pihak yang berwenang. Kurangnya koordinasi ini dibenarkan bapak Ahmad Rifadi, salah seorang informan dan pengawas jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BTM yang secara kebetulan bertemu saat mengawasi perbaikan jalan akibat ada bekas galian.

“Sebagai salah satu pengawas jalan dinas PU Bina Marga, saya menyoroti tindak lanjut pekerjaan

pembongkaran jalan akibat pemasangan pipa yang dilakukan oleh perusahaan. Saya sangat mendesak pihak perusahaan untuk senantiasa memperbaiki kembali jalan-jalan yang rusak pasca pembongkaran. Hasil pengawasan terhadap jalan-jalan di daerah ini menunjukkan bahwa masih banyak ditemui jalan yang belum diperbaiki.

Fakta yang ada bahwa pembongkaran salah satu sisi jalan, guna memasang pipa air bersih perusahaan, telah membuat beberapa ruas jalan di Kabupaten ini rusak dan bergelombang. Idealnya pihak perusahaan sendiri memperbaiki kembali jalan-jalan tersebut dengan pengaspalan ulang. Namun seperti saat ini anda lihat ternyata pihak perusahaan tidak memperbaiki kerusakan jalan akibat pembongkaran pipa, justru dari pihak kami sendirilah yang memperbaikinya. (Wawancara, 12 Juni 2021)

Selanjutnya bapak Rifandi sebagai pihak yang mewakili PU dalam menilai kelalaian perusahaan untuk memperbaiki kembali jalan yang rusak menyatakan bahwa :

“Galian pipa yang dilakukan oleh perusahaan selama ini dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak kami. Akibatnya, pihak kami merasa kelabakan dan sering dikeluhkan masyarakat. Setelah jalan digali, terus dibiarkan begitu saja, sehingga menyebabkan jalan menjadi rusak dan berlubang. Kedepan harapan saya tentu pihak kami akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas PU agar setelah penggalian dapat secepat mungkin dilakukan pengaspalan, sehingga jalan-jalan yang mengalami pembongkaran kembali berfungsi seperti sedia kala (wawancara, 12 Juni 2021)”.

Beberapa fakta yang dikumpulkan dari beberapa media menyatakan bahwa maraknya

galian aliran air perusahaan di perkotaan membuat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jawa Timur juga berang. Pasalnya, perusahaan dituding tidak berkoordinasi ketika menggali di tengah jalan. Bahkan, PU Bina Marga Jatim menilai kinerja perusahaan pelat merah itu tidak profesional. Selain tanpa ada koordinasi, setelah digali perusahaan mengabaikan keselamatan pengguna jalan dengan membiarkan kubangan di tengah jalan, hal ini disampaikan oleh salah satu pengawas jalan:

“Pada dasarnya maksud perusahaan baik, demi memberi pelayanan terbaik kepada konsumennya. Namun, tindakan perusahaan milik Pemkab itu terkesan tidak menghargai PU Bina Marga. Alasannya, perusahaan penyuplai air bersih itu cenderung hanya bisa merusak jalan, tapi tidak bisa mengembalikan seperti kondisi semula. "Ini (kubangan bekas perbaikan aliran air) juga perlu

disoroti, karena mengganggu pengguna jalan. Apalagi, tiba-tiba ada kubangan yang sebelumnya kami tidak tahu,".

Bukan hanya di sini (Jalan Kabupaten) tapi masih banyak lainnya. Memang tugas kami adalah memperbaiki jalan. Tapi, ya mbok kami diberi tahu. Sebab, jika terjadi kecelakaan akibat kubangan itu, kami yang disalahkan.

Tidak hanya masyarakat umum yang peduli terhadap dampak galian pemasangan sambungan air di jalan umum, pihak kepolisian sebagai pihak yang mengatur jalan raya juga memberikan perhatian khusus agar pihak perusahaan senantiasa memperhatikan perawatan kembali bekas galian sambungan air. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh seorang anggota Lantas Polres setempat Bapak AKP. Sulardi, SH dalam sebuah kesempatan.

“Hasil rekayasa lantas terhadap jalan berlubang ditemukan dilokasi yang terletak di Jl. Segara. Ini muncul usai adanya galian pipa air yang dilakukan oleh PERUSAHAAN setempat beberapa waktu lalu. Lokasinya terletak tepat didepan SLTPN 4 yang merupakan jalur utama masuk kota. Kami langsung mengambil dokumentasi terhadap jalan rusak yang memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi ini.

Sebagai langkah awal akan kami teruskan kepada instansi yang terkait dengan jalan supaya ada upaya perbaikan. Kami semaksimal mungkin berperan terhadap kepentingan masyarakat khususnya pengguna jalan, “supaya masyarakat nantinya dapat berkendara dengan nyaman dijalan” (Radar Madura, 22 April 2021).

Direktur Teknik perusahaan, ditemui secara terpisah mengakui adanya keluhan-

keluhan terkait bekas galian jalan raya. Secara terbuka beliau mengatakan:.

“Kami sebenarnya telah berusaha mengantisipasi keluhan terkait bekas galian dan genangan air bocor. Kami berusaha mengingatkan karyawan di lapangan untuk peduli membenahi bekas galian-galian itu. Tapi mungkin karena keterbatasan tenaga dan dana dari perusahaan sehingga tidak bisa optimal. Selain itu memang selama ini belum ada koordinasi yang baik pihak kami dengan dinas PU. Semoga kedepan hubungan ini akan lebih baik lagi..

Sebenarnya tidak hanya masalah ini yang kami terima. Karena terbatas dana, kami pun sering menghadapi protes dari warga sekitar sumber air. Itu karena kebocoran air yang tidak kami ketahui merusak area persawahan dan perumahan warga sekitar. Pengawasan secara rutin terhadap lokasi-lokasi sumber dan jalan-

jalan rusak jarang dilakukan karena keterbatasan sdm dan dana (wawancara, 13 Juni 2021)”

Beberapa permasalahan lingkungan akibat galian jalan dan air sumber di atas menjadi bukti kurang pedulinya perusahaan terhadap lingkungan. Peningkatan pendapatan menjadi lebih diunggulkan dan melupakan kewajiban sebagai konsekuensinya. Perusahaan harus lebih arif dan bijak dalam mengejar peningkatan pendapatan. Pendapatan yang terus meningkat penting bagi perusahaan, namun dampak sampingan untuk menghasilkan pendapatan tetap harus menjadi perhatian. Keadilan bagi lingkungan tetap harus dijaga dan tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan itu semua merupakan wujud kesalehan terhadap Allah SWT (Wahid, 2009).

Kesalehan terhadap alam menurut Wahid (2009) mengandung makna bahwa manusia diwajibkan untuk turut serta dalam

memelihara alam dan lingkungannya. Dalam surat Ar Ruum (41) dinyatakan: “telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). Selanjutnya dalam surat Al A'raf (56) dinyatakan: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Implikasi dari kedua ayat ini adalah bahwa dalam situasi perusahaan meningkatkan pendapatn, mereka tetap harus santun pada alam dengan menekankan etika Islam. Etikanya adalah melarang merusak lingkungan kecuali sangat diperlukan. Melakukan sesuatu yang akan menyebabkan timbulnya bencana alam, longsor, banjir dan kebakaran hutan misanya dapat dikategorikan dalam tindakan yang

dilarang oleh Islam dan tidak termasuk dalam kesalehan terhadap alam.

Manusia, perusahaan ataupun lembaga bisnis lainnya tentunya diperkenankan memanfaatkan alam dan lingkungan ini namun demikian tetap harus mempertimbangkan keseimbangan alam yang ada. Semua pihak tanpa pandang bulu dan dengan kesadaran tinggi tidak diperkenankan memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kelestarian alam. Terlebih lagi perusahaan merupakan unit masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan alam dan lingkungan.

BAB 8

Aplikasi *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA): Beban Hutang dan Gaji yang Tak Pernah Diharapkan

Kajian kinerja dengan perspektif *Islamic Political Economy of Accounting* hakekatnya memberikan keleluasaan untuk memahami kinerja khususnya beban secara lebih dalam dan mencakup segala aspek. Tidak hanya dipandang dari hasil akhir kinerja itu namun lebih dari itu adalah bagaimana kinerja itu dibangun mulai dari awal hingga berakhirnya periode laporan kinerja itu. Menilai kinerja dengan memotong bagian proses kinerja, terlebih lagi bagian akhir saja akan berakibat terjadi penilaian dan pemahaman yang tidak akurat dan bermakna kurang intergral. Mengungkap beberapa makna, nilai, dan kepentingan yang tersembunyi di balik angka beban merupakan tujuan dari analisis ini.

8.1. Perusahaan Menimbun Hutang: Kinerja Perspektif Materi

Beban hutang timbul dengan tujuan untuk mendanai investasi yang akan dibuat pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang juga dilakukan karena perusahaan berusaha menggunakan dana yang dimiliki untuk kepentingan lain yang lebih penting dan mendesak. Jika jumlah hutang sangat besar biasanya itu indikasi bahwa perusahaan memang akan melakukan investasi dalam jumlah yang besar.

Lilitan hutang perusahaan di seluruh Indonesia baik dari sisi jumlah maupun nominalnya terus mengalami peningkatan luar biasa dan menjadi masalah utama rendahnya kinerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dengan adanya hutang-hutang ini kebanyakan perusahaan menderita kerugian karena terbebani kewajiban membayar hutang yang besar dan tingginya biaya operasional jika dibandingkan

dengan pendapatan yang diperolehnya. Dari populasi PERUSAHAAN di Indonesia sekitar 300 perusahaan, sebagian besar menderita kerugian sebagai akibat ketidakefisienan dalam melakukan investasi yang dibiayai dengan hutang (YLKI, 2004)

Perusahaan juga menggunakan beberapa sumber hutang dalam menjalankan operasional perusahaan. Melalui Pemerintah Republik Indonesia perusahaan mengajukan pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI) dengan disertai Perjanjian Pinjaman Nomor : RDI-229/DDI/1990 tanggal 1 September 1990. Nilai plafon pinjaman saat itu berjumlah Rp 3.000.000.000,00. Jumlah yang direalisasikan sebesar Rp2.608.116.000,00, sedangkan sisa plafon yang tidak digunakan sebesar Rp391.884.000,00. Nilai pinjaman sebesar 3 milyar tersebut dapat dipergunakan perusahaan selama jangka waktu adalah 20 tahun termasuk masa tenggang lima tahun terhitung sejak tanggal. 1 September 1990. Jumlah pinjaman

yang sangat besar ini diperuntukkan untuk pembiayaan peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan jaringan pipa transmisi dan distribusi.

Tabel 8.1

Jumlah Hutang RDI Tahun 2015 – 2021

Tahun	Jumlah	Prosentase Kenaikan
2015	104.625.935	
2016	764.386.062	630%
2017	1.248.977.532	63%
2018	1.804.576.148	44%
2019	2.361.489.255	31%
2020	3.432.568.029	45%
2021	4.101.767.802	19%

Sumber: Laporan Keuangan 2015-2021

Hingga 7 tahun berjalan, jumlah pinjaman RDI” sebagaimana Tabel 8.1. telah berjumlah Rp 12.062.604.616. Padahal jumlah hutang RDI pertama kali direalisasikan pada tahun 1995 berjumlah Rp 104.625.935,-. Jumlah kenaikan pinjaman RDI setiap tahun mengalami lonjakan prosentase yang sangat fantastis.

8.2. Kenaikan Beban Hutang dalam Bingkai PESA

Meningkatnya beban hutang perusahaan dalam perspektif keuangan menjadi gambaran bahwa saat ini perusahaan memiliki tanggungan hutang yang sangat besar. Pemahaman kinerja beban hutang pada perspektif ini sebatas pada perkembangan angka-angka beban hutang. PESA berusaha mendapatkan pemahaman baik materi maupun nonmateri tentang makna-makna, nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan di balik angka kinerja beban hutang ini. Selain itu, menilai kinerja tidak saja dari sudut pandang pihak yang langsung berkepentingan, dengan perusahaan, namun juga pihak yang tidak berkepentingan, termasuk alam.

8.2.1. Hutang RDI: Datang Tak Diundang, Pergi Tak Ketahuan

Hutang RDI yang telah berlangsung lebih dari 8 tahun sesungguhnya merupakan program perbaikan perusahaan di Indonesia

menjadi lebih berkembang. Fakta menunjukkan bahwa setelah sekian lama hutang RDI ini dikemudian justru menjadi bumerang bagi perusahaan. Jangankan mencapai pertumbuhan dan kemajuan usaha yang lebih bagus, bertahan agar kinerja tidak tambah buruk saja sudah kesulitan.

Demikian pula yang terjadi pada perusahaan, sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan “*durian runtuh*” dari pemerintah justru mengalami titik balik kinerja ke arah negatif. Sebelum program pinjaman RDI ini mulai digulirkan yaitu tahun 2015 kinerja perusahaan masih sehat. Meskipun jumlahnya kecil namun perusahaan tetap mendapatkan laba dari hasil usaha. Namun setelah perusahaan mulai memanfaatkan pinjaman pada tahun 2015 maka saat itu pula kinerja mulai memburuk. Dari posisi laba, justru setelah mendapatkan pinjaman besar mengalami kerugian secara beruntun selama 20 tahun berjalan hingga saat ini

Tabel 8.2
Perkembangan laba (rugi) PERUSAHAAN BTM
Periode Tahun 2015 – 2021

Tahun	Laba (Rugi)
2015	1.434.928
2016	(323.246.210)
2017	(325.694.524)
2018	(562.551.896)
2019	(571.200.729)
2020	(876.417.879)
2021	(1.030.056.279)

Sumber: Data laporan

keuangan

Kondisi ini sangat memprihatinkan tentu, karena tujuan membuat pinjaman yang besar untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja ternyata malah sebaliknya. Nampak ada sesuatu yang salah dari proses awal hingga pemanfaatan pinjaman itu sendiri. Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari pihak manajemen ternyata penawaran pinjaman RDI itu penuh dengan kegagalan dan keanehan. Bagaimana tidak, perusahaan yang sebenarnya

tidak membutuhkan pinjaman saat itu ternyata “dipaksa” untuk mengambil pinjaman itu. Perpamsi Jawa Timur dan Bapenas saat itu berusaha meyakinkan perusahaan di Jawa Timur untuk turut memanfaatkan pinjaman itu.

Selain sifat pemaksaan ternyata diketahui juga bahwa proses pemberian pinjaman tersebut dilakukan tanpa ada studi kelayakan terhadap perusahaan yang akan menerima pinjaman. Hal ini dituturkan oleh Kepala Bagian Umum perusahaan dimana saat itu mengikuti proses perolehan pinjaman di Surabaya. Beliau menuturkan:

“Kalau masalah motivasi saya terus terang tidak tahu yang sesungguhnya dibalik pemberian pinjaman yang terkesan dipaksakan itu. Saya katakan dipaksakan karena memang kenyataannya begitu, waktu itu saya ikut hadir saat *briefing* pemberian pinjaman RDI di Hotel Hilton Surabaya. Anehnya semua PERUSAHAAN Jawa Timur diundang baik yang mengajukan dan

yang tidak mengajukan, dan khusus bagi PERUSAHAAN yang tidak mengajukan akhirnya “dipaksa” juga untuk mengajukan pinjaman tersebut.

Saat itu kami dari perusahaan tidak membawa berkas atau persyaratan pengajuan pinjaman. Karena memang niat kami berangkat ke hotel itu hanya undangan bukan mengajukan pinjaman. Tapi pulang-pulang kami mendapatkan pinjaman RDI dengan persyaratan menyusul setelah kembali dari Surabaya.

Terus terang saya hingga sekarang penasaran, apa sesungguhnya motivasi pemberian pinjaman itu. Masak hingga saat ini tidak ada pelunasan sama sekali dari PERUSAHAAN tapi mereka tenang-tenang saja, dan bahkan malah diberi program penghapusan. Mungkin ada unsur politiknya saat itu, biar pemerintahannya adem ayem gitu. (Wawancara, 25 Oktober 2021)

Sungguh sangat disayangkan memang, jumlah pinjaman yang sangat besar dan murah tidak dikelola secara baik dan terkesan tergesa-gesa mengejar suatu target. Pemberian hutang tanpa pertimbangan dan studi kelayakan atas kondisi perusahaan, tentu akan memberi kesempatan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Ternyata kekhawatiran itu bukan sekedar perkiraan namun menjadi “*rasan-rasan*” manajemen saat ini.

“Bagi kami selaku pimpinan baru, tidak ikut cawi-cawi atas hutang RDI masa lalu. Kami tidak tahu dana itu menjadi apa dan kemana saja. Mohon maaf, kami juga tidak merasa mendapatkan sesuatu dari itu, sehingga kami tidak merasa ada kewajiban untuk membayarnya”.
(Wawancara, 25 Oktober 2021)

8.2.2. Agenda Tersembunyi Pemberian Hutang

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pemberian hutang RDI yang cukup menjadi beban bagi perusahaan di Indonesia

pada umumnya. Hasil kajian YLKI menunjukkan bahwa tujuan pemberian hutang melalui *structural reform* ternyata memang belum dapat mencapai sasaran. Meski pemberian pinjaman telah dibuat “studi kelayakan” yang ditelaah dan disetujui oleh Bappenas, Kimpraswil dan perusahaan namun asumsi-asumsi studi itu banyak yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan sebagian besar perusahaan berada dalam status *default*. Biaya proyek dengan tingkat ketidakefisienan yang tinggi tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan tarif dengan alasan *full cost recovery* dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Bukti ketidakefektifan penggunaan hutang dan “blunder” penghapusan beban hutang semakin menimbulkan tanda tanya besar motivasi pemberian hutang. Hasil studi YLKI juga menyatakan bahwa ternyata pemberian hutang oleh pihak ketiga (Bank dunia, IMF dan lainnya) disertai dengan berbagai persyaratan

yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia sebelum dana pinjaman dapat dicairkan. Baik persyaratan yang bersifat teknis maupun persyaratan yang bersifat strategis yang terkadang terasa sangat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Persyaratan utama yang diajukan oleh lembaga keuangan internasional (World Bank dan IMF) saat membahas program penyehatan perusahaan adalah kebijakan *full cost recovery*. Oleh World Bank dan IMF, kebijakan ini dijadikan salah satu syarat dari berbagai pinjaman untuk restrukturisasi sektor air yang selama ini telah diberikan kepada beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Pernyataan ini didukung hasil kajian Sudhirendar (2002) yang menyatakan:

"Significantly, the full cost recovery principle is a disguise to promote privatisation. Because it is easier to manipulate poor economies to set the trend,

IMF imposed conditions of full cost recovery and/or privatisation in 12 of its 40 loans granted in 2000.

Sehubungan dengan konsep *full cost recovery* ini pihak perusahaan membenarkan sebagai salah satu prasyarat pencairan pinjaman RDI waktu itu, sebagaimana disampaikan Direktur Teknik:

Tarif kami sejak semula sudah disesuaikan dengan ketentuan persyaratan hutang RDI. *Full cost recovery* mensyaratkan tarif air ditentukan di atas biaya produksi sehingga diharapkan pendapatan dari penjualan air bisa menutupi biaya tersebut. Sudah lama kita terapkan sistem tarif yang diatas *full cost recovery* itu.

Saya tidak tahu apakah perusahaan lain sudah

menerapkan sistem ini atau tidak. Yang jelas kita berdasarkan persetujuan dewan telah lama menerapkan sistem tarif ini. Secara bisnis sistem ini memang menguntungkan bagi kami, tidak perlu kami mempertimbangkan menutup selisih biaya dibawah harga produksi (Wawancara, 29 Juni 2021).

Dugaan ini semakin jelas menunjukkan adanya skenario terstruktur untuk mendorong privatisasi dalam mekanisme pinjaman sektor air di beberapa negara berkembang. Padahal prinsip *full cost recovery* ini hanya tepat diterapkan jika proses bisnis penyediaan air bersih perusahaan berjalan sesuai dengan standar (ketentuan) pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Berbagai kelemahan dan ketidakberesan pengelolaan perusahaan seperti kebocoran yang tinggi, kinerja keuangan yang rendah,

pengelolaan hutang yang buruk, tingginya *idle capacity*, sudah bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga biaya operasional mencerminkan tingkat biaya persatuan produksi yang “normal” atau wajar.

Dengan adanya komersialisasi dan privatisasi tersebut maka jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat akan ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar “siapa ingin membeli dan siapa ingin menjual”. Bahkan secara internasional, dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO) yang berkaitan dengan perdagangan jasa yang dikenal dengan *General Agreement on Trade Services* (GATS) disebutkan bahwa kepemilikan oleh badan milik publik dianggap sebagai hambatan non tarif.

Sebagai tindak lanjut GATS, menurut YLKI (2004), pemerintah dilarang mengeluarkan peraturan yang menghambat perdagangan jasa secara global. Dengan demikian, dalam kerangka GATS, perusahaan asing penyedia layanan air bersih (*transnational water*

companies) mempunyai hak untuk beroperasi di Indonesia dan pemerintah tidak boleh untuk membatasinya dalam bentuk apapun. Jadi hal berarti pemerintah akan membuka peluang sebesar-besar kepada pihak swasta baik dalam maupun luar negeri untuk mengelola air di Indonesia.

Berkenaan dengan privatisasi air ini, sebenarnya bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Sudah banyak kasus menunjukkan kegagalan privatisasi di beberapa negara berkembang dalam pengelolaan air. Penelitian Sudhirendar (2002) yang dilakukan oleh *PSI's Research Unit, University of Greenwich, London* (2000) di Bolivia, Argentina, dan Pakistan menunjukkan adanya kenaikan harga air setelah privatisasi dan bahkan gagal melayani kelompok miskin. Di Cochabamba, Bolivia, setelah privatisasi terjadi kenaikan harga air sebesar 300% atau 25% dari total pendapatan kelompok miskin (*Majalah Air Minum*, Mei 2004). Di Ghana (2001), privatisasi

telah menaikkan harga air sebesar 95% dan memaksa penduduk miskin mengurangi secara drastis volume konsumsinya sehingga meningkatkan resiko kesehatannya. Begitu juga di Afrika Selatan, kenaikan harga air telah menyebabkan penduduk di wilayah Kwagulu-Natal mengkonsumsi air sungai yang terpolusi sehingga menimbulkan wabah cholera.

8.3. Biaya Gaji: Analisis Kinerja Perspektif Materi dan Bingkas PESA

Beban gaji merupakan salah satu bagian dari unsur biaya operasional perusahaan. Beban gaji termasuk dalam kelompok biaya administrasi dan umum yang merupakan bagian dari laporan laba rugi perusahaan. Selama lima tahun terakhir perkembangan biaya operasional mengalami kenaikan yang relatif stabil kira-kira hingga mencapai angka 10% pertahunnya.

Dari jumlah biaya operasional ini, biaya gaji karyawan perusahaan merupakan salah satu

komponen biaya administrasi dan umum terbesar kedua setelah beban hutang RDI. Data laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, komposisi biaya gaji karyawan selalu menempati urutan kedua setelah beban hutang RDI. Proporsi selama tiga tahun rata-rata biaya pegawai telah mencapai angka 34% dari keseluruhan biaya administrasi dan umum.

Tabel 8.3
Proporsi Biaya Gaji Terhadap
Biaya Administrasi

Keterangan	2019	2020	2021
Pegawai	1.224.156.380	1.148.947.368	1.025.142.501
Kantor	350.174.592	200.270.244	184.214.655
Hubungan			
Langganan	82.444.748	20.467.779	34.973.956
Penelitian & Pengemb.	6.000.000	9.955.000	12.822.000
Keuangan RDI	1.250.460.933	926.082.090	987.023.673
Pemeliharaan	156.228.525	106.654.121	82.104.194
Penyisihan			
Piutang	23.726.837	415.608.809	316.477.749
Rupa-rupa			
Umum	203.610.843	360.550.498	171.618.914
Penyusutan	209.371.544	290.932.587	170.942.944

Sumber: Laporan Keuangan PERUSAHAAN, diolah

Biaya gaji karyawan dan biaya hutang RDI pada kenyataannya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keseluruhan biaya administrasi dan umum. Tabel 8.3 memaparkan proporsi biaya gaji terhadap biaya operasional secara keseluruhan. Rata-rata biaya gaji pertahun selama lima tahun terakhir mencapai angka Rp 1.067.802.795, atau sekitar 16% dari biaya operasional secara keseluruhan. Sedangkan rata-rata kenaikan gaji pertahun mencapai Rp 91.371.695.

Dari data biaya gaji selama lima tahun terakhir bisa disimpulkan bahwa kecenderungan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan biaya gaji setiap tahun bisa mencapai rata-rata sebesar 9%. Besarnya kenaikan biaya gaji setiap tahun menjadi bukti bahwa memang biaya gaji menjadi masalah yang pelik dan terus menjerat perusahaan.

8.3.1. Intervensi Kekuasaan: Karyawan Sudah Melampaui Standar

Permasalahan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di perusahaan air minum merupakan problematika yang tiada berakhir. Hampir semua di Indonesia memiliki jumlah karyawan yang berlebihan. Jumlah karyawan sebenarnya telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 47 tahun 1999. Standar yang ditentukan adalah setiap 100 pelanggan dapat ditangani oleh satu orang karyawan. Kenyataannya perusahaan di Indonesia memiliki jumlah karyawan yang melebihi standar yang telah ditentukan.

Tabel 8.4

Perkembangan Jumlah Karyawan

Keterangan	Jumlah
Pelanggan	8.600
Karyawan (Riil)	145
Karyawan (Ideal: 1 per 100)	86
Jumlah Kelebihan	59
Prosentase Kelebihan	69%

Sumber: Data Personalia PERUSAHAAN, diolah

Keseluruhan karyawan perusahaan pada tahun bersangkutan berjumlah 145 orang yang terdiri dari 129 orang merupakan tenaga tetap dan sisanya sebanyak 16 orang merupakan tenaga kontrak perusahaan. Sedangkan jumlah pelanggan yang dimiliki perusahaan pada tahun yang sama berjumlah 8.600. Artinya jika dihitung menggunakan Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999, maka jumlah ideal karyawan perusahaan harusnya sebanyak 86 orang. Dengan demikian jumlah karyawan perusahaan pada tahun 2008 telah melebihi jumlah ideal yang ditetapkan. Jumlah kelebihan karyawan saat itu sebanyak 59

orang. Berdasarkan data kepegawaian dan teknik, ternyata kelebihan jumlah karyawan ini sudah berlangsung lama. Tercatat untuk lima tahun terakhir jumlah karyawan selalu melebihi jumlah seharusnya. Jumlah kelebihan karyawan tidak tanggung-tanggung setiap tahunnya yaitu hingga mencapai 63 orang. Sehingga bisa dihitung biaya yang harus ditanggung akibat kelebihan karyawan perbulannya.

Berlebihannya jumlah karyawan perusahaan secara langsung diakui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten BTM dalam suatu kesempatan:

Salah satu penyebab kerugian yang dialami perusahaan adalah karena disebabkan Jumlah pegawai (karyawan) yang cukup besar (112 karyawan) dimana jumlah pegawai yang wajar hanya sekitar 80 karyawan saja sehingga berdampak pada tingginya biaya gaji pegawai. Sehubungan kondisi ini guna menjamin kelangsungan hidup PERUSAHAAN perlu dilakukan

langkah-langkah dengan memanfaatkan kelebihan pegawai tersebut secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan (Surat Penegasan Nomor 900/128/441.601/2007)

Pada kesempatan yang lain Bapak Sudarmoko sebagai ketua tim pemeriksa Badan Pengawas Kabupaten menyatakan:

“Hasil temuan Bawasda menunjukkan bahwa salah satu penyebab kerugian yang cukup signifikan dari perusahaan adalah karena kelebihan jumlah pegawai. Sudah kelebihan namun perusahaan masih saja menerima 16 orang tanpa pertimbangan ekonomis perusahaan.

Sebenarnya standar karyawan perusahaan daerah air minum secara nasional setiap 100 pelanggan adalah 1 karyawan. Saat ini jumlah pelanggan yang ada sebanyak 8.600 yang berarti bahwa standarnya perusahaan memiliki karyawan 86 orang. Namun kenyataannya jumlah karyawan telah mencapai 113 orang, tidak termasuk tenaga kontrak.

Jumlah kelebihan sebanyak 45 karyawan ini mengakibatkan beban pengeluaran untuk gaji perusahaan meningkat untuk setiap periodenya, itulah mengapa kondisi perusahaan berada dalam level tidak sehat dan setiap tahun akan menderita kerugian

Tanggapan lain juga dikemukakan oleh Bapak Khidir salah satu Anggota Komisi B DPRD memberikan tanggapan atas kelebihan jumlah karyawan:

Saya menyayangkan tingginya jumlah karyawan yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PERUSAHAAN) hingga mencapai 145 orang. Ternyata ini menjadi beban bagi pelanggan air bersih. "Ini tidak ideal mas. Karyawan perusahaan terlalu banyak,"

Dikatakan, sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 47/99 tentang rasio karyawan perusahaan, tiap unit harus punya 5 karyawan untuk seribu pelanggan. Di unit tertentu ini punya 8

ribu. Tapi bukan masalah, kami masih mentolerir.

Tapi yang heran perusahaan ini telah mempunyai 145 karyawan di 13 kecamatan. Ini benar-benar tidak wajar. "Gini Mas, menimbang keputusan mendagri, jika di Pamekasan secara keseluruhan ada 8.800 pelanggan, karyawan PERUSAHAAN harus 72 orang. Nah, di Pamekasan ada 152 karyawan. Apa gak berlebihan.

Jumlah karyawan yang banyak sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari periode-periode tahun sebelumnya. Sudah sejak lama jumlah ideal karyawan ini tidak digunakan sebagaimana pernyataan Direktur Utama:

“Sebelum saya masuk menjadi Direktur perusahaan, karyawan disini waktu itu sudah mencapai 121 orang. Itu untuk jumlah pelanggan sebanyak 500 pelanggan. Jika saat ini jumlah karyawan kita 152 orang sesungguhnya itu tidak semuanya diterjunkan untuk menangani pelanggan air bersih (Wawancara, 1 Juli 2021)

Selain karena warisan periode-periode sebelumnya penambahan jumlah karyawan juga telah dilakukan hingga mencapai 152 orang. Penambahan jumlah karyawan yang terus dilakukan ini secara logika tidak bisa dipisahkan dari unsur kepentingan pihak-pihak yang secara langsung terikat dengan perusahaan. Sebagai perusahaan plat merah yang dimiliki oleh pemerintah daerah jelas tidak dapat dipisahkan dari kepentingan-kepentingan para “penguasa daerah”, terlebih lagi disadari bahwa selama ini pengangkatan Direktur Utama masih menjadi wewenang Bupati Kepala Daerah bersangkutan. Oleh karena itu tak mengherankan bilamana selama ini terkesan menjadi “tempat penitipan” kepentingan-kepentingan pimpinan daerah.

Selama ini pola intervensi dari pejabat dalam memasukkan kerabat, kenalan, saudara, keluarga untuk bekerja di perusahaan atau sebagai penempatan sementara secara berkepanjangan membuat PERUSAHAAN tidak mempunyai rencana dan kewenangan rekrutmen

pegawai sesuai kebutuhan. Kepentingan demi kepentingan membuat pihak manajemen kadang tidak berdaya membendung masuknya tenaga-tenaga baru ke dalam perusahaan. Anehnya terkadang kepentingan pimpinan satu dengan lainnya berbenturan. Salah satu faktanya adalah ketika Bawasda melakukan pemeriksaan dan mencatat temuan audit atas kelebihan jumlah karyawan padahal sesungguhnya hal itu telah mendapatkan pertimbangan dari badan ini. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Direktur Utama perusahaan:

”Rekrutmen yang dimaksud Bawasda itu merupakan program peningkatan status pegawai dari tenaga kontrak menjadi pegawai perusahaan. Proses pelaksanaan pengangkatan karyawan itupun sesungguhnya telah mendapatkan arahan dari BAWASDA dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain lamanya menjadi tenaga kontrak, kemampuan/skill, serta jenjang pendidikannya.”

Bentuk-bentuk intervensi secara langsung para “penguasa daerah” juga dibenarkan oleh kepala bagian personalia dan keuangan perusahaan yang menyatakan:

Penentuan calon karyawan selama ini sulit untuk dikatakan objektif atau tidak, toh kenyataanya banyak juga karyawan yang merupakan titipan dari orang-orang kuat di jajaran pemerintah daerah ataupun orang-orang direksi perusahaan sendiri.

Saya tidak tahu itu disebut intervensi atau bukan, tapi yang jelas ada beberapa karyawan yang merupakan orang-orang titipan dari pihak yang memiliki kekuatan di perusahaan. Inilah salah satu penyebab mengapa karyawannya melebihi jumlah ideal dengan jumlah pelanggannya. Bagi perusahaan tambahan karyawan berarti tambahan biaya gaji yang harus dicadangkan setiap bulannya.

Ya bagaimana lagi pak, wong yang kuasa sudah maunya seperti itu. ini sulit memang dipisahkan dari kepentingan pejabat-pejabat Pemda. dari dulu hingga sekarang kan masih dibawah Pemda jadi

mungkin wajar kalau banyak pihak (pejabat) yang memiliki kepentingan dengan perusahaan ini.

Program rekrutmen berikutnya harusnya tidak ada, hanya karyawan yang pensiun atau meninggal yang akan kita ganti dengan karyawan baru tapi itupoun tetap akan dipertimbangkan dengan standar yang ada. Tapi sekali lagi saya sulit mengatakan kalau tidak akan ada tambahan karyawan baru. Saya sudah pengalaman beberapa kali tiba-tiba saja saya disodori karyawan baru padahal perusahaan tidak membutuhkannya tapi katanya ini orangnya bos. (Wawancara, 23 September, 2021)

BAB 9

Aplikasi *Political Economy of Shariah Accounting* (PESA) Perusahaan Rugi Terus: Kerugian Fatamorgana (*SARAABUN*)

Sudah bisa ditebak jika beban operasional perusahaan jauh lebih besar daripada pendapatan, maka pasti kerugian yang ditanggung. Kerugian yang dipikul oleh perusahaan dalam perspektif PESA tidak bisa begitu saja dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sebagaimana Tinker (1980) menyatakan bahwa akuntansi tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan di mana akuntansi itu diterapkan. Hal ini berarti bahwa harus dipahami dan dimengerti bahwa kerugian besar yang dialami oleh perusahaan secara beruntun bukan merupakan peristiwa terpisah dari konteks lingkungan dimana perusahaan ini berada. Kerugian itu adalah dampak dari

pengaruh lingkungan yang terus-menerus mempengaruhi perusahaan.

9.1. Selalu Rugi: Terbelenggu Dalam Keterpurukan

Ketika pertama kali hutang RDI digulirkan yaitu tahun 1995, semua pihak berasumsi dan berharap besar bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik dari tahun sebelumnya. Dua tahun sebelum pencairan, secara berturut-turut perusahaan masih memiliki kinerja positif meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Laba tahun 2016 dan 2017 tercatat masing-masing Rp 31.542.410 dan Rp 1.434.920

Namun bersamaan dengan pencairan hutang RDI, pada tahun berikutnya 2015 hingga tahun terakhir 2021 kinerja itu semakin berbalik arah. Bukannya leba yang diperoleh, tapi kerugian demi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin lama kerugian menunjukkan *trend* yang makin meninggi,

Tabel 9.1
Perkembangan Kerugian

Tahun	Laba (Rugi)
2014	31.542.410
2015	1.434.920
2016	(323.246.210)
2017	(325.694.520)
2018	(562.551.890)
2019	(571.200.720)
2020	(876.417.880)
2021	(1.030.056.280)

Sumber: Laporan Keuangan

Selama 8 tahun terakhir kondisi perusahaan sangat menyedihkan. Tiga tahun pertama yaitu tahun 2014 telah terjadi kerugian yang sangat besar hingga mencapai Rp 323.246.210. Begitu pula pada tahun berikutnya kerugian terus berlanjut hingga mencapai angka milyar rupiah pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun selanjutnya meskipun jumlah menurun namun kerugian masih dialami

perusahaan. Terhitung rata-rata kerugian yang dialami perusahaan selama enam belas tahun terakhir hingga mencapai Rp 530.157.244 pertahun.

9.2. Makna Kerugian Dalam Perspektif PESA

Secara hitungan sangat mudah memahami mengapa perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan tidak dapat menutup jumlah kerugian yang sangat besar sehingga timbul rugi. Atau karena beban terus meningkat sementara pendapatan relatif *stagnan* maka timbullah kerugian. Itulah alasan yang bisa dikemukakan dalam sudut pandang materi untuk menjawab pertanyaan mengapa perusahaan rugi.

Namun demikian mengingat angka-angka kinerja ini tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan maka jawaban di atas menjadi makin tidak jelas. Diperlukan pemahaman dan penilaian yang lebih *integral* mengapa

perusahaan mengalami kerugian. PESA hadir untuk memberikan penilaian dan pemahaman akan makna, nilai dan kepentingan yang tersirat dalam angka kinerja tersebut.

9.2.1. Tarif Naik Bukan Solusi Bijak Menutup Rugi

Tarif menurut Bappenas (2003) dan YLKI (2004:20) adalah salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan memiliki kinerja rendah di Indonesia. Tarif yang ditentukan oleh hampir seluruh perusahaan di Indonesia berada di bawah biaya produksi. Oleh karena tarif masih di bawah biaya produksi maka pendapatan yang diterima tidak mampu menutup beban yang makin besar. Dengan demikian solusi yang harus dilakukan adalah perlu melakukan penyesuaian tarif secara bertahap agar mampu menutup biaya produksi.

Hasil kajian di atas secara logika memang bisa dibenarkan, namun dalam kenyataannya perlu dipertanyakan kembali. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus perusahaan selama

hampur enam bels tahun terakhir. Meskipun tingkat tarif yang ditetapkan selalu berada di atas biaya produksi namun pada kenyataannya kinerja perusahaan masih tetap terpuruk

Berdasarkan hasil analisis ini maka bisa disimpulkan bahwa tarif bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kerugian yang dialami perusahaan. Menaikkan tarif bukan cara bijak untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyak dengan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keterjangkauan dan kejujuran. Tarif yang tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Timur tidak berarti jaminan bagi perusahaan kinerja mereka akan lebih baik.

Banyak bukti menunjukkan bahwa tarif perusahaan kota lain yang “lebih bijak” ternyata mampu memperbaiki kinerja perusahaan. sebagai contoh, tarif air kota lain masih dibawah tarif perusahaan. Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki pemerintah daerah setempat bukan menjadi penghalang

untuk membuat terobosan usaha. Mereka membuka diri dan mau bekerjasama dengan pemerintah daerah lain adalah solusinya. Dampaknya tarif relatif terjangkau, kualitas dan kuantitas air bisa dinikmati oleh masyarakat pelanggan.

9.2.2. Surat Penegasan: Buah Simalakama Meraih Laba

Kerugian yang dialami perusahaan dalam enam belas tahun terakhir sebenarnya merupakan kondisi yang makin memperkuat persepsi masyarakat bahwa perusahaan publik identik dengan ketidakefisienan dan tidak mandiri. Visi yang tidak ditetapkan secara jelas dan sumber dana subsidi dari pemerintah yang rutin membuat perusahaan semakin terlena dan tidak memiliki semangat mandiri.

Bagi perusahaan, anggapan ini nampaknya bukan sekedar wacana

namun menjadi suatu kebenaran. Keberadaan “**Surat Penegasan**” menjadi saksi utama bagaimana perusahaan dimanjakan dengan dana dan jaminan keberlangsungan hidup meski dalam kondisi merugi. Surat penegasan ini berisi jaminan Bupati atas kelangsungan hidup perusahaan dikarenakan kondisi kerugian yang makin besar. Adanya surat jaminan ini dibenarkan oleh pihak Direktur Umum dan Keuangan perusahaan:

Memang benar pak ada jaminan Bupati tentang keberlanjutan usaha perusahaan. Coba lihat Surat Keputusan Bupati ini. Dengan surat ini ada jaminan perusahaan tidak akan ditutup meskipun dalam kondisi rugi. SK ini sudah lama diminta oleh akuntan publik sebagai syarat jaminan keberlangsungan operasi perusahaan.

Bagi kami selaku pengelola jaminan ini sangat berarti karena konsekuensinya jika kami kekurangan dana maka kami akan mengajukan dana tambahan kepada Bupati. Dana untuk investasi transmisi pipa air, itu juga kami peroleh dari Pemda. Jadi tidak ada sedikitpun kekhawatiran kami akan di phk karena perusahaan rugi.

Surat penegasan ini memang akhirnya menjadi “jaminan” bagi pihak manajemen untuk terus melangsungkan operasi perusahaan dalam kondisi apapun. Sesungguhnya surat jaminan ini menjadi buah simalakama bagi perusahaan. Jika tidak ada surat itu, perusahaan tidak memiliki jaminan dari mana suntikan dana akan datang. Tapi dipihak lain surat itu secara langsung telah membuat motivasi kerja manajemen dan karyawan sangat rendah dan sempit. Mereka bekerja dengan motivasi apa adanya, perusahaan terus

merugi, namun mereka juga tetap mendapatkan gaji tetap seperti biasa setiap bulan. Dampak keberadaan surat jaminan terhadap motivasi kerja perusahaan dibenarkan oleh kepala bagian umum:

Surat jaminan ini kami minta setiap tahun sebagai salah satu syarat terbitnya opini akuntan publik. Dan setiap tahun pula Bupati sebagai kepala daerah mengeluarkan surat penegasan ini.

Ya memang SK itu juga ada kerugiannya, motivasi karyawan terutama sangat terpengaruh. Tidak seperti di perusahaan swasta, untuk mendapat keuntungan maereka akan kerja keras. Sebab jika rugi terus maka mereka sendiri yang akan teracam phk.

Disini motivasi kerja teman-teman tidak sebaik di swasta. Teman-teman sepertinya kerja di Pemda, pulang kalau sudah

waktunya pulang, datang saat jam kantor masuk. Yang penting apa yang diperintahkan pimpinan dikerjakan sudah beres.

Inilah salah satu hambatan besar psikologi yang tidak disadari oleh seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan. Bisa jadi inilah salah satu faktor lain yang membuat perusahaan semakin terpuruk. Semangat kerja yang tanpa persaingan ditambah jaminan keberlangsungan operasi perusahaan dalam kondisi apapun, menyebabkan perusahaan bekerja ala kadarnya. Sifat ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah daerah membuat manajemen dan karyawan bekerja layaknya bukan perusahaan. Bekerja tanpa target keuntungan dan terlepas dari jerat kerugian.

9.2.3. Rugi Besar Terus, Uang Banyak

Apakah ada perusahaan yang selama enam belas tahun rugi terus-menerus tapi masih bisa beroperasi? Apakah pantas disebut perusahaan rugi, jika masih bisa menggaji karyawan secara normal, masih bisa membayar rekening listrik, telepon, bayar konsultan pajak, bayar konsultan IT dan bayar auditor secara rutin? Tidak mungkin!!!. Inilah jawaban yang tepat dan normal dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Kalaupun ada barangkali hanya ada dalam dunia khayalan dan di sinetron-sinetron.

Bagi perusahaan, situasi dan kondisi yang digambarkan dalam pertanyaan-pertanyaan di atas adalah sebuah realitas. Aneh tapi nyata, itulah barangkali yang tepat diungkapkan untuk menggambarkan kondisi nyata di perusahaan. Meski dilanda kerugian terus-menerus sepanjang masa tapi perusahaan kokoh berdiri dan mampu

membayar seluruh biaya-biaya rutin secara kontan.

Hasil penelusuran data dan wawancara dengan informan perusahaan menunjukkan bahwa sebenarnya secara likuiditas perusahaan memiliki kemampuan yang sangat besar. Disamping mampu membayar biaya-biaya rutin secara kas, ternyata rata-rata jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan setiap akhir tahun sangat besar yaitu mencapai 1, 9 milyar. Jumlah kas yang sangat besar untuk ukuran perusahaan yang secara hitungan dilanda kerugian.

Tabel 9.2

Perbandingan Jumlah Kas dan Hutang RDI

Tahun	Jumlah Kas/Setara Kas	Jumlah Hutang RDI
2017	1.525.930.176	6.933.755.765
2018	1.656.651.767	7.990.607.260
2019	2.145.436.958	9.440.988.482
2020	2.183.901.372	10.540.944.972
2021	1.976.584.314	12.062.604.616

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Tabel 9.2. menunjukkan situasi keuangan yang sangat kontras antara jumlah kas dan setara kas dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang RDI. Rata-rata kas dan setara kas yang hampir mencapai 2 milyar ternyata tidak mampu melunasi hutang RDI satu rupiahpun. Padahal jika mau, rata-rata jumlah saldo kas akhir periode yang besar ini mampu untuk melunasi hutang RDI dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tabel 9.3
Perbandingan Jumlah Kerugian dan Kontribusi Pajak

Tahun	Jumlah Kerugian	Jumlah Pembayaran Pajak
2017	(875.235.826)	Nihil
2018	(615.633.155)	Nihil
2019	(309.481.508)	Nihil
2020	(729.294.576)	Nihil
2021	(320.539.745)	Nihil

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

menginginkan kondisi rugi terus tapi uangnya banyak. Dengan rugi berarti kami kan tidak perlu membayar pajak penghasilan yang kalau dihitung dan dibandingkan dengan perusahaan lain yang bayar pajak jumlahnya cukup besar. Jumlah pembayaran pajak penghasilan yang dibayar ke kantor pajak kan lebih baik untuk operasional atau bayar gaji karyawan.

Makanya saya sebenarnya tidak begitu senang adanya program pemutihan dan pembebasan beban hutang RDI oleh pemerintah pusat. Karena bagi kami dengan pembebasan itu berakibat kinerja laporan laba rugi menjadi tidak merugi lagi. Konsekuensinya jelas secara bertahap kami akan laba dan selanjutnya akan membayar pajak penghasilan yang jumlahnya tidak sedikit.

Justru kondisi ini yang akan kami hindari, biarkan kinerja kami seakan rugi tapi didalam perusahaan

sesungguhnya kami sehat karena kami sanggup bayar operasional, melakukan investasi yang diperlukan dan lain sebagainya (Wawancara, 28 Juli 2021)

Ketika dimintai pendapat tentang fenomena pembayaran pajak penghasilan yang nihil, penundaan hutang RDI dan jumlah kas yang melimpah informan ini menyatakan:

Mengapa kas kami banyak dan melimpah, ya karena beban terbesar kami selama ini hampir 15 tahun yaitu pembayaran pokok RDI, biaya administrasi, bunga, denda administrasi dan bunga tidak kami bayar secara tunai dengan kas. Kami sengaja tidak membayar karena memang kami mendengar dari pembicaraan teman-teman perusahaan di Perpamsi bahwa akan ada program pemutihan atas hutang RDI tersebut. Kalau kami bayar secara tunai jumlahnya bisa 1 milyar lebih dalam setahun itu berat bagi kami.

Coba anda hitung kalau dengan cara ditunda pembayarannya maka berarti saya meski tetap membebankan biaya tersebut ke dalam laba rugi tapi kas nya tidak keluar. Sama-sama rugi membebankan tapi kalau dibayar tunai kami tidak punya dana segar. Tapi kalau dengan ditunda dapat dua keuntungannya, satu tidak bayar pajak penghasilan, kedua uang kasnya masih banyak ya kan..

9.2.4. Meski Rugi, Wajib Setor PAD: Dana Hutang RDI Buat Setoran

Sudah rugi masih setor PAD ke pemerintah daerah, darimana uangnya ya? Inilah pertanyaan besar yang menjadi perhatian dan kebingungan banyak pihak terhadap perusahaan. Secara logika tentu tidak mungkin dalam kondisi rugi perusahaan masih mampu setor PAD ke Pemda. Tapi inilah realitas yang terjadi, perusahaan masih mampu membayar PAD selama bertahun-

tahun meski dalam kondisi rugi terus. Tentu selama itu pula beban keuangan perusahaan semakin bertambah.

Berdasarkan data keuangan perusahaan pada Tabel 9.4. Jumlah setoran PAD perusahaan ke pemda dalam lima tahun terakhir rata-rata mencapai angka Rp 119.300.000 pertahun. Padahal pada tahun yang bersamaan jumlah kerugian yang dialami perusahaan juga besar. Jadi ada kesan bahwa setoran ini diwajibkan dalam kondisi apapun. Nampak bahwa pihak perusahaan sendiri tidak memiliki pilihan selain menyetor dana ke PAD Pemda.

Tabel 9.4.
Perbandingan Setoran PAD dan Kerugian

Tahun	PAD	Kerugian
2017	120.000.000	(875.235.826)
2018	132.000.000	(615.633.155)
2019	140.000.000	(309.481.508)
2020	87.500.000	(729.294.576)
2021	117.000.000	(320.539.745)
Rata-rata	119.300.000	

Sumber: Data Laporan Keuangan

Sehubungan dengan “wajibnya” perusahaan menyetor PAD ini dua informan Direktur Umum dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, secara seragam menyatakan:

Kita ini perusahaan milik Pemda, kalau tidak setor PAD itu jadi bumerang buat pimpinan pak. Bisa-bisa kita dipecat untuk mengelola perusahaan ini. Setoran PAD kami jadi ukuran kinerja bagi pimpinan perusahaan. Jika tidak setor atau setorannya kecil itu jadi pertanyaan besar bagi Pemda kepada kami.

Saya tahu semestinya dalam kondisi rugi perusahaan tidak perlu setor PAD ke Pemda. Tapi itu bentuk kompromi kami ke Pemda agar terus bisa di bantu dan dijamin keberlangsungan perusahaan ini. Dan juga untuk menunjukkan kinerja kita bahwa perusahaan punya kontribusi ke PAD Pemda (Wawancara, 28 Juli 2021)

Berdasarkan informasi ini memang pihak perusahaan merasa tidak enak untuk tidak menyetor ke PAD. Padahal menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 26 huruf 3 (a) menyebutkan bahwa:

“Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: (a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan (c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat”.

Jadi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tersebut setoran PAD baru bisa dilakukan jika perusahaan mengalami laba. PAD bersumber dari bagian laba perusahaan bukan dari bagian rugi perusahaan. Hal ini berarti jika perusahaan laba maka ada kewajiban untuk memberikan sebagian laba ke kas Pemda sebagai tambahan PAD. Namun sebaliknya jika perusahaan rugi maka logikanya tidak perlu ada setoran ke kas Pemda.

“Keterpaksaan” perusahaan menyetor PAD kepada Pemda ini mendapat sorotan dari

Ketua Perpamsi Ir H.Achmad Marjo Kudri, dalam suatu kesempatan:

Berdasarkan peraturan yang baru Perusahaan Daerah Air Minum (perusahaan) tidak ada kewajiban menyetorkan keuntungan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dalam undang-undang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nomor tahun 2010, perusahaan masuk dalam Perusahaan Umum Daerah (Perumda), bukan Persero. Perusahaan yang diakui berdasarkan peraturan BUMD adalah perumda ada perseroda, namun Perumda dipegang 100 persen dipegang pemerintah. Sementara Perseroda dipegang swasta.

Dalam peraturan tersebut perusahaan masuk dalam Perumda, bila masuk Perumda maka perusahaan tidak ada kewajiban harus memberikan keuntungan untuk peningkatan PAD. Melainkan berdasarkan ketentuan tersebut keuntungan harus dikembalikan ke dalam perusahaan, sebagai investasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada

publik. Bila inventasi berasal dari keuntungan itu terus ditingkatkan maka harapannya, adalah perusahaan berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Karena dilakukan dengan penuh keterpaksaan itu maka tidak heran jika perusahaan melakukan segala macam cara untuk menyeter PAD. Tidak ada niat lain selain agar kinerja mereka mendapatkan penilaian yang bagus dari Pemda. Temuan menteri pekerjaan umum tentang penyalahgunaan pinjaman luar negeri untuk setoran PAD ke Pemda setempat menjadi contoh praktek yang *illegal*. Bapak Djoko Kirmanto menyampaikan temuannya dalam suatu pertemuan:

“Akibat kewajiban untuk menyeter kepada pemerintah daerah, perusahaan kerap menyalahgunakan dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal dana dari pemerintah pusat dialokasikan

untuk meningkatkan investasi perusahaan.

Temuan Dirjen kami atas pencarian dana yang telah dilakukan pemerintah pusat menunjukkan bahwa pada akhir tahun ketika dilakukan pengecekan terdapat aliran dana dari PERUSAHAAN ke kas daerah. Itu berarti tidak ada dan yang digunakan untuk investasi. Itu hanya memindahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Departemen Pekerjaan Umum ke daerah”

Sungguh naïf jika praktek-praktek penyeteran PAD kepada Pemda ini dilakukan seperti ini. Mengejar keuntungan pribadi pimpinan di mata Pemda, mengorbankan institusi dan juga pelanggan.

9.2.5. Perusahaan Rugi: Ulah Pelanggan Juga

Dalam perspektif pelanggan barangkali tidak banyak yang memahami mengapa perusahaan mengalami kerugian. Hal itu disebabkan sejauh ini perusahaan belum mengungkapkan laporan keuangan kepada

publik secara transparansi. Oleh karena itu pelanggan memiliki persepsi yang berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Di mata pelanggan semua menyatakan dan yakin bahwa perusahaan seharusnya memiliki laba besar. Menurut mereka pembayaran rekening dilakukan secara rutin dan lancar, sementara kucuran air belum menunjukkan kualitas dan kuantitas yang diharapkan.

Pernyataan ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Tinik seorang pelanggan yang berada di salah satu kelurahan Patemon di kota BTM:

Saya kok tidak yakin bila Perusahaan rugi, saya dan mungkin pelangga lain bayar rekening air rutin dan jika saya bandingkan dengan kota lain mahal sekali disini. Rekening saya tidak pernah turun-turun dari angka 200.000 perbulan. Tapi meski saya bayar mahal dan rutin, air yang saya peroleh tak sebanding dengan mahalnya

bayar. Mau tidak langganan disini tidak ada sumur, serba repot mas saya ini.

Air tidak pernah hidup lancar, kadang hidup kadang mati, giliran hidup hanya sedikit sekali. Itu tetangga saya bayar mahal juga tapi airnya keluar kalau malam jam 12 sampai jam 3, jadi lembur-lembur nungguin air (14 Nopember 2021).

Kinerja perusahaan yang rendah tidak hanya bergantung pada manajemen namun juga dipengaruhi pihak luar perusahaan yaitu pemerintah daerah, legislatif serta pihak pelanggan. Oleh karena itu untuk menilai kinerja tidak bisa hanya dipandang dari manajemen saja namun juga dari pihak lain. Pelanggan sebagai salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan produk perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Tidak hanya dari daya beli dan kepuasan pelanggan

atas produk perusahaan, namun juga sikap pelanggan terhadap cara memperoleh produk dari perusahaan.

Dalam sudut pandang proses penjualan produk perusahaan, ternyata masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Permasalahan itu berupa kecurangan-kecurangan yang dilakukan pelanggan. Bentuk-bentuk kecurangan pelanggan hingga saat ini banyak dijumpai, semisal tidak melaporkan *water meter* yang telah rusak, kolusi antara petugas pencatat meter dengan pelanggan untuk menekan biaya rekening, berlangganan dengan illegal, dan lain sebagainya. Banyaknya modus “pencurian air” oleh pelanggan secara illegal dan tidak jujur ini secara nyata merugikan perusahaan.

Praktek-praktek pencurian air oleh pelanggan dibenarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan mereka:

“Perusahaan masih menderita kerugian terutama disebabkan tingkat kebocoran air yang tinggi. Perusahaan belum sepenuhnya dapat mengendalikan kebocoran pada tingkat kebocoran yang normal 20%. Hal ini tampak dari jumlah kebocoran air sebesar 35,68% melebihi batas normal.

Beberapa penyebab kondisi tersebut karena adanya meter air yang telah rusak yang lebih dari lima tahun belum ada peneraan, ada pelanggan yang tidak menggunakan meter air sehingga pembayaran rekening air dikenakan tariff rata-rata minimal, serta adanya indikasi pemasangan sambungan langgan illegal oleh oknum masyarakat

Modus penyimpangan lain yang bisa dilakukan pelanggan terhadap produk perusahaan dengan melakukan kolusi dengan karyawan perusahaan sebagaimana diakui Ibu Yuyun pelanggan yang bermukim di bagian pusat kota:

Kalau pembayaran rekening air saya sekarang sudah turun ini berkat teman senamku yang juga karyawan perusahaan. Sebelum diturunkan biasanya rekening listrik saya tidak pernah berubah setiap bulannya 200 ribu dari bulan ke bulan selama kira-kira 5 tahunan. Untungnya saya punya teman senam terus saya iseng-iseng tanya sama dia dan menjanjikan akan bantu.

Suatu saat pas saya mau bayar ke perusahaan saya ketemu dulu dengan teman senam itu, temanku langsung datang ke bagian penagihan dan kasir terus entah ngomong-ngomong apa. Alhamdulillah pembayaran rekening langsung turun 100 ribu saat itu. (Wawancara, 12 Agustus 2021).

Gambaran beberapa modus penyimpangan perolehan air bersih oleh pelanggan semata-mata ingin menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan itu belum bisa diatasi oleh perusahaan, dan jika hal tersebut tidak segera diatasi maka akan terus

membebani perusahaan sepanjang masa. Sebaliknya jika ada keinginan untuk segera mengatasi “kenakalan” pelanggan sesuai prosedur aturan yang ada maka kinerja yang baik segera akan diraih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, Barry. 1998. Political Economy: A Comparative Approach. *Second Edition*. Praeger Publisher. London.
- Cooper DJ, And Shere,MJ, 1984, The Value Of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economic Of Accounting, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 5 No. 1 Pp. 161-166.
- Departemen Agama RI, 2000, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Hoogvelt, A & Tinker, A M, 1978, The Role of the Colomal and Post Colonial State a Imperialism, *Journal of Modern Studies* pp 67-79
- Ikbar, Yanuar, 2006, *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Irianto, Gugus, 2006, *Privatisasi BUMN Di Indonesia: Pilihan Atau Keniscayaan? Telaah Dari Perspektif PEA, Proceeding*, The Second Postgraduate Consortium On Accounting 2006, Brawijaya University Malang.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Hal 196 – 204.

- Muhammad Dan Fauroni, Lukman, 2002, *Visi Alquran Tentang Etika Dan Bisnis*, Penerbit Salemba Diniyah
- Shaoul, Jean, 1997a, A Critical Financial Analysis Of The Performance Of Privatised Industries : The Case Of The Water Industry In England And Wales, *Critical Perspectives On Accounting*, 8 , 479 – 505
- Shaoul, Jean, 1997b, The Power Of Accounting Reflecting On Water Privatization, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol 10 No. 3, 1997.
- Slamet, M, 2001, *Enterprises They Dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syariah)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Staniland, 1985, The New Political Economy, *Political Studies*, XLIII, 516-530.
- Tinker, T,1980, Towards A Political Economic Of Accounting: An Empirical Illustration Of The Cambridge Controversies, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 5 No. 1 Pp. 147-160.
- Triyuwono, Iwan, 1997, Akuntansi Syariah Dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Metafora

Amanah, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol.1 No.1: 1-46

Uphoff And Ilchman (1972), The Politics Of Organizational Undevelopment, *Industrial And Labour Relations Review*, October.

Wahab, Solichin A., 1999, *Ekonomi Politik Pembangunan*, PT. Dinar Wijaya, Malang.

Wiboyo, Harry, 1988, *Kritik Terhadap Ekonomi Neo Klasik : Suatu Pengantar Menuju Pendekatan Ekonomi Politik Baru*, Makalah Lepas, Bandung.